2.		
	00	
	perkebunan	orang
3.		Keluarga
4.	Jumlah anggota rumah tangga buruh	
	perkebunan	orang
5.	A A A A	
	perkebunan untuk setiap rumah tangga	
	perkebunan	Rp
	DEMINISTRATION AND THE PROPERTY OF THE PROPERT	
	B. PETERNAKAN	T/ also and
$\frac{1}{2}$	Jumlah rumah tangga peternakan	Keluarga
2.	Jumlah total anggota rumah tangga	orang
	peternakan	Keluarga
	Jumlah rumah tangga buruh peternakan	Neluaiga
4.		orang
5.	peternakan Jumlah pendapatan percapita dari sektor	orang
٥,	peternakan untuk setiap rumah tangga	
		Rp
	peternakan	10
<u> </u>	, PERIKANAN	
1.	Jumlah rumah tangga perikanan	Keluarga
$\frac{1.}{2.}$	Jumlah total anggota rumah tangga perikanan	Retualga
∠.	Juman total anggota ruman tangga perikanan	orang
3.	Jumlah rumah tangga buruh perikanan	Keluarga
4.		
٦.	perikanan	orang
		orang
E		1
5.		·
5.	perikanan untuk setiap rumah tangga	Rn
5.		Rp
	perikanan untuk setiap rumah tangga perikanan	Rp
A.!	perikanan untuk setiap rumah tangga perikanan 5. KERAJINAN	
A.!	perikanan untuk setiap rumah tangga perikanan 5. KERAJINAN Jumlah rumah tangga pengrajin	Keluarga
A.! 1. 2.	perikanan untuk setiap rumah tangga perikanan 5. KERAJINAN Jumlah rumah tangga pengrajin Jumlah total anggota rumah tangga pengrajin	Keluarga
A.! 1. 2. 3.	perikanan untuk setiap rumah tangga perikanan 5. KERAJINAN Jumlah rumah tangga pengrajin Jumlah total anggota rumah tangga pengrajin Jumlah rumah tangga buruh pengrajin	Keluarga orang Keluarga
A.! 1. 2. 3. 4.	perikanan untuk setiap rumah tangga perikanan 5. KERAJINAN Jumlah rumah tangga pengrajin Jumlah total anggota rumah tangga pengrajin Jumlah rumah tangga buruh pengrajin Jumlah anggota rumah tangga buruh pengrajin	Keluarga
A.! 1. 2. 3.	perikanan untuk setiap rumah tangga perikanan 5. KERAJINAN Jumlah rumah tangga pengrajin Jumlah total anggota rumah tangga pengrajin Jumlah rumah tangga buruh pengrajin Jumlah anggota rumah tangga buruh pengrajin Jumlah pendapatan percapita dari sektor	Keluarga orang Keluarga orang
A.! 1. 2. 3. 4.	perikanan untuk setiap rumah tangga perikanan 5. KERAJINAN Jumlah rumah tangga pengrajin Jumlah total anggota rumah tangga pengrajin Jumlah rumah tangga buruh pengrajin Jumlah anggota rumah tangga buruh pengrajin	Keluarga orang Keluarga
A.! 1. 2. 3. 4. 5.	perikanan untuk setiap rumah tangga perikanan 5. KERAJINAN Jumlah rumah tangga pengrajin Jumlah total anggota rumah tangga pengrajin Jumlah rumah tangga buruh pengrajin Jumlah anggota rumah tangga buruh pengrajin Jumlah pendapatan percapita dari sektor pengrajin untuk setiap rumah tangga pengrajin	Keluarga orang Keluarga orang
A.! 1. 2. 3. 4. 5.	perikanan untuk setiap rumah tangga perikanan 5. KERAJINAN Jumlah rumah tangga pengrajin Jumlah total anggota rumah tangga pengrajin Jumlah rumah tangga buruh pengrajin Jumlah anggota rumah tangga buruh pengrajin Jumlah pendapatan percapita dari sektor pengrajin untuk setiap rumah tangga pengrajin 6. PERTAMBANGAN	Keluarga orang Keluarga orang Rp
A.! 1. 2. 3. 4. 5. A. 1.	perikanan untuk setiap rumah tangga perikanan 5. KERAJINAN Jumlah rumah tangga pengrajin Jumlah total anggota rumah tangga pengrajin Jumlah rumah tangga buruh pengrajin Jumlah anggota rumah tangga buruh pengrajin Jumlah pendapatan percapita dari sektor pengrajin untuk setiap rumah tangga pengrajin 6. PERTAMBANGAN Jumlah rumah tangga pertambangan	Keluarga orang Keluarga orang
A.! 1. 2. 3. 4. 5.	perikanan 5. KERAJINAN Jumlah rumah tangga pengrajin Jumlah total anggota rumah tangga pengrajin Jumlah rumah tangga buruh pengrajin Jumlah anggota rumah tangga buruh pengrajin Jumlah anggota rumah tangga buruh pengrajin Jumlah pendapatan percapita dari sektor pengrajin untuk setiap rumah tangga pengrajin 6. PERTAMBANGAN Jumlah rumah tangga pertambangan Jumlah total anggota rumah tangga	Keluarga orang Keluarga orang Rp Keluarga
A.! 1. 2. 3. 4. 5. A. 1. 2.	perikanan 5. KERAJINAN Jumlah rumah tangga pengrajin Jumlah total anggota rumah tangga pengrajin Jumlah rumah tangga buruh pengrajin Jumlah anggota rumah tangga buruh pengrajin Jumlah anggota rumah tangga buruh pengrajin Jumlah pendapatan percapita dari sektor pengrajin untuk setiap rumah tangga pengrajin 6. PERTAMBANGAN Jumlah rumah tangga pertambangan Jumlah total anggota rumah tangga pertambangan	Keluarga orang Keluarga orang Rp
A.! 1. 2. 3. 4. 5. A. 1.	perikanan 5. KERAJINAN Jumlah rumah tangga pengrajin Jumlah total anggota rumah tangga pengrajin Jumlah rumah tangga buruh pengrajin Jumlah anggota rumah tangga buruh pengrajin Jumlah anggota rumah tangga buruh pengrajin Jumlah pendapatan percapita dari sektor pengrajin untuk setiap rumah tangga pengrajin 6. PERTAMBANGAN Jumlah rumah tangga pertambangan Jumlah total anggota rumah tangga pertambangan	Keluarga orang Keluarga orang Rp Keluarga Keluarga
A.! 1. 2. 3. 4. 5. A. 1. 2.	perikanan 5. KERAJINAN Jumlah rumah tangga pengrajin Jumlah total anggota rumah tangga pengrajin Jumlah rumah tangga buruh pengrajin Jumlah anggota rumah tangga buruh pengrajin Jumlah pendapatan percapita dari sektor pengrajin untuk setiap rumah tangga pengrajin 6. PERTAMBANGAN Jumlah rumah tangga pertambangan Jumlah total anggota rumah tangga pertambangan Jumlah rumah tangga buruh pertambangan	Keluarga orang Keluarga orang Rp Keluarga
A.! 1. 2. 3. 4. 5. A. 1. 2.	perikanan 5. KERAJINAN Jumlah rumah tangga pengrajin Jumlah total anggota rumah tangga pengrajin Jumlah rumah tangga buruh pengrajin Jumlah anggota rumah tangga buruh pengrajin Jumlah pendapatan percapita dari sektor pengrajin untuk setiap rumah tangga pengrajin 6. PERTAMBANGAN Jumlah rumah tangga pertambangan Jumlah total anggota rumah tangga pertambangan Jumlah rumah tangga buruh pertambangan Jumlah rumah tangga buruh pertambangan	Keluarga orang Keluarga orang Rp Keluarga Keluarga Keluarga
A.! 1. 2. 3. 4. 5. A. 1. 2. 4.	perikanan 5. KERAJINAN Jumlah rumah tangga pengrajin Jumlah total anggota rumah tangga pengrajin Jumlah rumah tangga buruh pengrajin Jumlah anggota rumah tangga buruh pengrajin Jumlah pendapatan percapita dari sektor pengrajin untuk setiap rumah tangga pengrajin 6. PERTAMBANGAN Jumlah rumah tangga pertambangan Jumlah total anggota rumah tangga pertambangan Jumlah rumah tangga buruh pertambangan Jumlah anggota rumah tangga buruh pertambangan	Keluarga orang Keluarga orang Rp Keluarga Keluarga Keluarga
A.! 1. 2. 3. 4. 5. A. 1. 2.	perikanan 5. KERAJINAN Jumlah rumah tangga pengrajin Jumlah total anggota rumah tangga pengrajin Jumlah rumah tangga buruh pengrajin Jumlah anggota rumah tangga buruh pengrajin Jumlah pendapatan percapita dari sektor pengrajin untuk setiap rumah tangga pengrajin 6. PERTAMBANGAN Jumlah rumah tangga pertambangan Jumlah total anggota rumah tangga pertambangan Jumlah rumah tangga buruh pertambangan Jumlah anggota rumah tangga buruh pertambangan Jumlah anggota rumah tangga buruh pertambangan Jumlah pendapatan perkapita dari sektor	Keluarga orang Keluarga orang Rp Keluarga Keluarga Keluarga
A.! 1. 2. 3. 4. 5. A. 1. 2. 4.	perikanan untuk setiap rumah tangga perikanan 5. KERAJINAN Jumlah rumah tangga pengrajin Jumlah total anggota rumah tangga pengrajin Jumlah rumah tangga buruh pengrajin Jumlah anggota rumah tangga buruh pengrajin Jumlah pendapatan percapita dari sektor pengrajin untuk setiap rumah tangga pengrajin 6. PERTAMBANGAN Jumlah rumah tangga pertambangan Jumlah total anggota rumah tangga pertambangan Jumlah rumah tangga buruh pertambangan Jumlah anggota rumah tangga buruh pertambangan Jumlah anggota rumah tangga buruh pertambangan Jumlah pendapatan perkapita dari sektor pertambangan untuk setiap rumah tangga	Keluarga orang Keluarga orang Rp Keluarga orang Keluarga orang
A.! 1. 2. 3. 4. 5. A. 1. 2. 4.	perikanan 5. KERAJINAN Jumlah rumah tangga pengrajin Jumlah total anggota rumah tangga pengrajin Jumlah rumah tangga buruh pengrajin Jumlah anggota rumah tangga buruh pengrajin Jumlah pendapatan percapita dari sektor pengrajin untuk setiap rumah tangga pengrajin 6. PERTAMBANGAN Jumlah rumah tangga pertambangan Jumlah total anggota rumah tangga pertambangan Jumlah rumah tangga buruh pertambangan Jumlah anggota rumah tangga buruh pertambangan Jumlah anggota rumah tangga buruh pertambangan Jumlah pendapatan perkapita dari sektor	Keluarga orang Keluarga orang Rp Keluarga Keluarga Keluarga
A.! 1. 2. 3. 4. 5. 4. 5.	perikanan untuk setiap rumah tangga perikanan 5. KERAJINAN Jumlah rumah tangga pengrajin Jumlah total anggota rumah tangga pengrajin Jumlah rumah tangga buruh pengrajin Jumlah anggota rumah tangga buruh pengrajin Jumlah pendapatan percapita dari sektor pengrajin untuk setiap rumah tangga pengrajin 6. PERTAMBANGAN Jumlah rumah tangga pertambangan Jumlah total anggota rumah tangga pertambangan Jumlah rumah tangga buruh pertambangan Jumlah anggota rumah tangga buruh pertambangan Jumlah pendapatan perkapita dari sektor pertambangan untuk setiap rumah tangga pertambangan pertambangan	Keluarga orang Keluarga orang Rp Keluarga orang Keluarga orang
A.! 1. 2. 3. 4. 5. A. 1. 2. A. 1. 2.	perikanan untuk setiap rumah tangga perikanan 5. KERAJINAN Jumlah rumah tangga pengrajin Jumlah total anggota rumah tangga pengrajin Jumlah rumah tangga buruh pengrajin Jumlah anggota rumah tangga buruh pengrajin Jumlah pendapatan percapita dari sektor pengrajin untuk setiap rumah tangga pengrajin 6. PERTAMBANGAN Jumlah rumah tangga pertambangan Jumlah total anggota rumah tangga pertambangan Jumlah rumah tangga buruh pertambangan Jumlah anggota rumah tangga buruh pertambangan Jumlah pendapatan perkapita dari sektor pertambangan untuk setiap rumah tangga pertambangan Jumlah pendapatan perkapita dari sektor pertambangan 7. KEHUTANAN	Keluarga orang Keluarga orang Rp Keluarga orang Keluarga orang Rp rang
A.! 1. 2. 3. 4. 5. 4. 5.	perikanan untuk setiap rumah tangga perikanan 5. KERAJINAN Jumlah rumah tangga pengrajin Jumlah total anggota rumah tangga pengrajin Jumlah rumah tangga buruh pengrajin Jumlah anggota rumah tangga buruh pengrajin Jumlah pendapatan percapita dari sektor pengrajin untuk setiap rumah tangga pengrajin 6. PERTAMBANGAN Jumlah rumah tangga pertambangan Jumlah total anggota rumah tangga pertambangan Jumlah rumah tangga buruh pertambangan Jumlah anggota rumah tangga buruh pertambangan Jumlah pendapatan perkapita dari sektor pertambangan untuk setiap rumah tangga pertambangan Jumlah pendapatan perkapita dari sektor pertambangan untuk setiap rumah tangga pertambangan 7. KEHUTANAN Jumlah rumah tangga kehutanan	Keluarga Keluarga orang Rp Keluarga Keluarga orang Keluarga orang Rp Keluarga keluarga

Jumlah anggota rumah tangga buruh	orang
Jumlah pendapatan perkapita dari sektor	
	Rp
Reflectation	
B. INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN	
BESAR	
Jumlah rumah tangga perkebunan	Keluarga
	orang
	Keluarga
	orang
industri	
Jumlah pendapatan percapita dari sektor	
industri untuk setiap rumah tangga industri	Rp
9. JASA DAN PERDAGANGAN	
Jumlah rumah tangga sektor jasa dan	
	Keluarga
	orang
	
	Keluarga
-	orong
perdagangan	orang
Jumlah pendapatan percapita dari sektor jasa	
dan perdagangan untuk setiap rumah tangga	
jasa dan perdagangan	Rp
	Jumlah pendapatan perkapita dari sektor kehutanan untuk setiap rumah tangga kehutanan 3. INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN BESAR Jumlah rumah tangga perkebunan Jumlah total anggota rumah tangga perkebunan Jumlah rumah tangga buruh industri Jumlah rumah tangga buruh industri Jumlah total anggota rumah tangga buruh industri Jumlah pendapatan percapita dari sektor industri untuk setiap rumah tangga industri 9. JASA DAN PERDAGANGAN Jumlah rumah tangga sektor jasa dan perdagangan Jumlah total anggota rumah tangga jasa perdagangan Jumlah rumah tangga buruh jasa dan perdagangan Jumlah anggota rumah tangga buruh jasa dan perdagangan Jumlah pendapatan percapita dari sektor jasa dan perdagangan Jumlah pendapatan percapita dari sektor jasa dan perdagangan untuk setiap rumah tangga

B. PENDAPATAN RILL KELUARGA

	4 <i>.</i> 0КК
Jumlah Anggota Keluarga	/3.!&orang
Jumlah Fendapatan Kepala Keluarga	RpJuta
Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang	1 1 10
bekerja	Rp! Juta
Jumlah Total Pendapatan Keluarga	Rp
Rata-rata Pendapatan Peranggota keluarga	Rp

V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR

1. Sektor Pertanian	1116
Petani	40 orang
Buruh tani	1.56 orang
Pemilik usaha pertanian	orang
2. Sektor Perkebunan	
Buruh perkebunan	Zr orong
Karyawan Perusahaan Perkebunan	35 orang
Pemilik usaha Perkebunan	orang
3. Sektor Peternakan	27076
Buruh usaha peternakan	orang
Pemilik usaha peternakan	orang

4. Sektor Perikanan	
Nelayan	orang
Pemilik usaha perikanan	orang
Buruh usaha perikanan	orang
	orang
5. Sektor Kehutanan	orang
Pemilik usaha pengolahan hasil hutan	orang
Buruh usaha pengolahan hasil hutan	orang
Pengumpul hasil hutan	orang
	orang
	orang
	orang
6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C	
Penambang galian C kerakyatan/perorangan	orang
Pemilik usaha pertambangan skala kecil dan besar	orang
Buruh usaha pertambangan	orang
	orang
	orang
	orang
7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah	
Tangga	
Montir	3 orang
Tukang batu	orang
Tukang kayu	13 orang
Tukang sumur	orang
Pemulung	orang
Tukang jahit	2 orang
Tukang kue	3 orang
Tukang anyaman	orang
Tukang rias	1 orang
Pengrajin industri rumah tangga lainnya	orang
- 3 - 3	orang
	orang
	orang
	orang
8. Sektor Industri Menengah dan Besar	orong
Karyawan perusahaan swasta	orang
Karyawan perusahaan pemerintah	orang
Pemilik perusahaan	orang
Bangsau(.Perusahaan Kayu)	8 orang
	orang
9. Sektor Perdagangan	orang
Pengusaha perdagangan hasil bumi	orang
Buruh jasa perdagangan hasil bumi	orang
10. Sektor Jasa	3 orang
Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan	D

· ·	
Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan	orang
Pemilik usaha informasi dan komunikasi	orang
Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi	orang
Kontraktor	orang
Pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata	orang
Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata	orang
Pemilik usaha hotel dan penginapan lainnya	orang
Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya	orang
Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	29
Pegawai Negeri Sipil	16 orang
TNI	1 orang
POLRI	1 orang
Dokter swasta	orang
Bidan swasta	2 orang
Perawat swasta	orang
Dukun/paranormal/supranatural	orang
Jasa pengobatan alternatif	orang
Dosen swasta	orang
Guru swasta	2 orang
Pensiunan TNI/POLRI	2 orang
Pensiunan PNS	orang
Pensiunan swasta	orang
Pengacara	orang
Notaris	orang
Jasa Konsultansi Manajemen dan Teknis	orang
Seniman/artis	orang
Pembantu rumah tangga	orang
Sopir	3 orang
Buruh migran perempuan	3.6 orang
Buruh migran laki-laki	5.8 orang
Usaha jasa pengerah tenaga kerja	orang
Wiraswasta lainnya	orang
Tidak mempunyai matapencaharian tetap	orang
Jasa penyewaan peralatan pesta	orang

VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT

A. ASET TANAH	orong
Tidak memiliki tanalı	orang
Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha	orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha	orang
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha	orang
Memiliki tahan antara 0,01 0,5 ha	orang
Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha	orang
Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha	orang
Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha	orang
Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha	orang
Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha	
Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha	orang
Memiliki tanah antara 1,0 - 5,0 ha	orang
memiliki tanah antara 5,0 - 10 ha	orang
Memiliki tanah lebih dari 10 ha	orang
Jumlah total penduduk	orang

B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM	
Memiliki ojek	orangunit
Memiliki becak	orangunit
Meimliki cidemo/andong/dokar	orangunit
Memiliki kapal motor	orangunit
Memiliki bus	orangunit
Memiliki mini bus	orangunit
Memiliki helikopter dan atau pesawat	orangunit
	8
C. ASET SARANA PRODUKSI	
Memiliki penggilingan padi	orang
Memiliki traktor	orang
Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian	orang
Memiliki kapal penangkap ikan	orang
Memiliki alat pengolahan hasil perikanan	orang
Memiliki alat pengolahan hasil peternakan	orang
Memiliki alat per.golahan hasil perkebunan	orang
Memiliki alat pengolahan hasil hutan	orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil	
pertambangan	orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil	
pariwisata	orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri	
jasa perdagangan	orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil	
Industri kerajinan keluarga skala kecil dan	orang
menengah	
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil	
industri migas	orang
D. ASET PERUMAHAN	
RUMAH MENURUT DINDING	
Tembok	2 Rumah
Kayu	3.86 Rumah
Bambu	Rumah
Tanah liat	Rumah
Pelepah kelapa/lontar/gebang	Rumah
Dedaunan	Rumah
Deddurari	Rumah
RUMAH MENURUT LANTAI	
Keramik	80 Rumah
Semen	Rumah
Kayu	.3.08 Rumah
Tanah	Rumah
Tarren.	
RUMAH MENURUT ATAP	• Damah
Genteng	2 Rumah
Seng	2.6.a Rumah
Asbes	26 Rumah
Beton	Rumah
Bambu	Rumah
Kayu	Rumah
Daun lontar/gebang/enau .	Rumah
Daun ilalang	Rumah
DAUN KELARA	

VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA

Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik	
lainnya	4.0 <i>3</i> . Keluarga
Jumlah keluarga memiliki sepeda motor/sejenisnya	ga
daman keraanga memmi sepesaa meter, sejemenya	215. Keluarga
Jumlah keluarga memiliki mobil dansejenisnya	
Jumlah keluarga memiliki perahu bermotor	64 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki kapal barang	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki kapal penumpang	1 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki kapal pesiar	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki helikopter	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki pesawat terbang	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki ternak besar	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki ternak kecil	Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki hiasan	ga
emas/berlian	Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki buku tabungan	111111111111111111111111111111111111111
	Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki buku surat	
	Keluarga
berharga Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat deposito	Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat tanah	63 Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat bangunan	111000111110100100
Julillali keluarga yang memiliki sertilikat banganan	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki perusahaan industri	9
besar	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki peruahaan industri	
menengah	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki perusahaan industri	
kecil	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha perikanan	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha peternakan	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha perkebunan	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha pasar swalayan	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar swalayan	
	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki	
usaha di pasar tradisional	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar desa	Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha	
transportasi/pengangkutan	Keluarga
Junilah keluarga yang memiliki aset telekomunikasi	Keluarga
Jumlah keluarga yang memiliki saham di	
perusahaan	Keluarga
	Keluarga
	Keluarga
Jumlah Keluarga seluruhnya	Ketuaiga

VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT

A. Tingkat Pendidikan Penduduk

Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin67..... orang

Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak50..... orang

Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	orang
Jumlah penduduk sedang SD/sederajat	orang
Jumlah penduduk tamat SD/sederajat	51.5 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat	
Jumlah penduduk sedang SLTP/sederajat	/0.5 orang
Jumlah penduduk tamat SLTP/sederajat	
Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajat	94 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat	26.5 orang
Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat	7 orang
Jumlah penduduk sedang D-1	orang
Jumlah penduduk tainat D-1	orang
Jumlah penduduk sedang D-2	orang
Jumlah penduduk tamat D-2	orang
Jumlah penduduk sedang D-3	orang
Jumlah penduduk tamat D-3	orang
Jumlah penduduk sedang S-1	orang
Jumlah penduduk tamat S-1	5.0 orang
Jumlah penduduk sedang S-2	orang
Jumlah penduduk tamat S-2	orang
Jumlah penduduk tamat S-3	orang
Jumlah penduduk sedang SLB A	orang
Jumlah penduduk tamat SLB A	orang
Jumlah penduduk sedang SLB B	orang
Jumlah penduduk tamat SLB B	orang
Jumlah penduduk sedang SLB C	orang
Jumlah penduduk tamat SLB C	orang
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental	orang orang
% Penduduk buta huruf [(1): jumlah penduduk] x	
100%	%
% Penduduk tamat SLTP/sederajat	
[(3):jumlah penduduk] x 100%	%

B. Wajib belajar 9 tahun

D. Wajib Belajar > tarrate	
	3.6/ orang
0. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih	35.1 orang
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	<i>lo</i> orang

C. Rasio Guru dan Murid

C .	Rasio dura dan maria	
1.	Jumlah Guru TK dan kelompok bermain anak	4 orang
2	Jumlah Siswa TK dan kelompok bermain anak	50 orang
3	Jumlah Guru SD dan sederajat	1.3 orang
4	Jumlah siswa SD dan sederajat	1.4 orang
5	Jumlah guru SLTP dan sederajat	
6	Jumlah siswa SLTP dan sederajat	
7	Jumlah Guru SLTA/sederajat	orang
0	Jumlah siswa SLTA/sederajat	orang
	Jumlah siswa SLB	orang
). Jumlah guru SLB	orang
1 1 (liimian gulu See	

D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat

). Relembagaan rendidina	
Γ	Jumlah perpustakaan desa/kelurahan	unit
+	Jumlah taman bacaan desa/kelurahan	unit

Jumlah perpustakaan keliling	unit
Jumlah sanggar belajar	unit
Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah	kegiatan
Junilah kelompok belajar Paket A	kelompok
Jumlah peserta ujian Paket A	orang
Jumlah kelompok belajar Paket B	kelompok
Jumlah Peserta ujian Paket B	orang
Jumlah kelompok belajar Paket C	kelompok
Jumlah peserta ujian Paket C	orang
Jumlah lembaga kursus keterampilan	unit
Jumlah peserta kursus keterampilan	orang

IX. KESEHATAN MASYARAKAT

A. Kualitas Ibu Hamil

Jumlah ibu hamil	24 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu	orang
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas	orang
Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit	orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek	orang
Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek	orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih	orang
Jumlah kematian ibu hamil	## orang
Jumlah ibu hamil melahirkan	14 orang
Jumlah ibu nifas	orang
Jumlah kematian ibu nifas	orang
Jumlah ibu nifas hidup	orang

B. Kualitas Bayi

Jumlah keguguran kandungan	orang
Jumlah bayi lahir	/4 orang
Jumlah bayi lahir mati	! orang
Jumlah bayi lahir hidup	orang
Jumlah bayi mati usia 0 - 1 bulan	
Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan	orang
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg	2. orang
Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita	
kelainan organ tubuh, fisik dan mental	orang

C. Kualitas Persalinan

Tempat Persalinan		
Tempat persalinan Rumah Sakit Umum	unit	
Tempat persalinan Rumah Bersalin	unit	
Tempat persalinan Puskesmas	/ unit	
Tempat persalinan Polindes	unit	
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak	unit	
Tempat persalinan rumah praktek bidan	unit	
Tempat praktek dokter	unit	
Ruinah dukun	unit	
Rumah sendiri	unit	

Pertolongan Persalinan	
Jumlah Persalinan ditolong Dokter	tindakan
Jumlah persalinan ditolong bidan	tindakan
Jumlah persalinan ditolong perawat	tindakan
Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin	tindakan
Jumlah persalinan ditolong keluarga	tindakan

1.

D. Cakupan Imunisasi

DI CHILIPPIE IZINIIONO		
/:/orang		
orang		
orang		
orang		
orang		

E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB

Pasangan Usia Subur		
Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun	8.3orang	
Jumlah perempuan usia subur 15 - 49 tahun	20orang	
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16		
tahun	orang	
Jumlah pasangan usia subur	20pasangan	
Keluarga Berencana	_	
Jumlah akseptor KB	orang	
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik	orang	
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral	4.5orang	
Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom	5orang	
Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil	orang	
Jumlah pengguna metode vasektomi	orang	
Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi	orang	
Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB		
Alamiah	orang	
Jumlah pengguna metode KB obat tradisional	orang	
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode	orang	
Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB	orang	

F. Wabah Penyakit

r. Waban i chyunic	
MUNTABER	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	kejadian
Jumlah yang meninggal	kejadian
DEMAM BERDARAH	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	kejadian
Jumlah yang meninggal	kejadian

Lampiran V

..... kejadian

Jumlah yang meninggal	kejadian
,	
POLIO	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	kejadian
Jumlah yang meninggal	kejadian
CIKUNGUNYA	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	kejadian
Jumlah yang meninggal	kejadian
8 86	
FLU BURUNG	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	kejadian
Jumlah yang meninggal	kejadian
BUSUNG LAPAR	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	kejadian
Jumlah yang meninggal	kejadian
odinian yang meninggar	
KELAPARAN	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	kejadian
Jumlah yang meninggal	kejadian
ouman yang memiggai	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	kejadian
Jumlah yang meninggal	kejadian
Juman yang memiggar	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	kejadian
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah yang meninggal	kejadian
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini Jumlah yang meninggal	kejadian kejadian
Jumlah yang meninggal	kejadian
Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup	kejadian
Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan	kejadian
Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota	TahunTahunTahun
Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi	TahunTahunTahun
Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota	
Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional	TahunTahunTahun
G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional	
G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional	
Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih Jumlah keluarga menggunakan sumur gali Jumlah keluarga pelanggan PAM	
Jumlah yang meninggal G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih Jumlah keluarga menggunakan sumur gali Jumlah keluarga pelanggan PAM	kejadianTahunTahunTahunTahuntahunkeluargakeluarga
G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional	kejadianTahunTahunTahunTahunkeluargakeluarga
G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 2. Jumlah keluarga pelanggan PAM 3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan 4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa	kejadianTahunTahunTahunTahunkeluargakeluarga
G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih 1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali 2. Jumlah keluarga pelanggan PAM 3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan 4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa	kejadianTahunTahunTahunTahuntahunkeluargakeluargakeluarga
G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional	kejadianTahunTahunTahunTahunkeluargakeluargakeluargakeluarga
G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional	kejadianTahunTahunTahunTahuntahunkeluargakeluargakeluargakeluargakeluarga
G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional	kejadianTahunTahunTahunTahuntahunkeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluarga
G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional	kejadian TahunTahunTahunTahunkeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluarga
G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional	kejadian TahunTahunTahunTahunkeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluarga
G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional	kejadian TahunTahunTahunTahunkeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluarga
G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional	kejadian TahunTahunTahunTahunkeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluarga
G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional	kejadian TahunTahunTahunTahunkeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluarga
G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional	kejadian TahunTahunTahunTahunkeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluargakeluarga
G. Angka Harapan Hidup Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota Angka Harapan Hidup Provinsi Angka harapan Hidup Nasional	TahunTahunTahun

KOLERA Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini I. Perilaku hidup bersih dan sehat

i. Fernaku nidup bersin dan senat		
Kebiasaan buang air besar		
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat	36keluarga	
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang		
memenuhi standar kesehatan	keluarga	
Jumlah keluarga biasa buang air besar di		
sungai/parit/kebun/hutan		
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK		
umum	keluarga	
Pola makan		
Kebiasaan penduduk makan dalam sehari 1 kali	Ada/tidak	
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali	Ada/tidak	
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali	Ada/tidak	
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali	Ada/tidak	
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali	Ada/tidak	
Kebiasaan berobat bila sakit		
Dukun Terlatih	Tak ada/	
*	sedikit/banyak	
Dokter/puskesmas/mantri	Tak-ada/	
kesehatan/perawat/bidan/posyandu	sedikit/banyak	
Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif	Tak ada/	
. 0	sedikit/banyak	
Paranormal	Tak-ada/	
	sedikit/banyak	
Obat tradisional dari keluarga sendiri	Tak-ada/	
5	sedikit/banyak	
Tidak diobati	Tak ada/	
	sedikit/banyak	

J. Status Gizi Balita

O. Denend Gibi Barre	
Jumlah Balita	68orang
Jumlah Balita bergizi buruk	orang
Jumlah Balita bergizi baik	/6.0orang
Jumlah Balita bergizi kurang	
Jumlha Balita bergizi lebih	orang

K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini

Jumlah penyakit	Jumlah penderita	Di rawat di
Jantung	orang	Rumah/RS/Puskesmas
Lever	orang	Rumah/RS/Puskesmas
Paru-paru	orang	Rumah/RS/Puskesmas
Kanker	orang	Rumah/RS/Puskesmas
Stroke	orang	Rumah/RS/Puskesmas
Diabetes Melitus	orang	Rumah/RS/Puskesmas
Ginjal	orang	Rumah/RS/Puskesmas
Malaria	orang	Rumah/RS/Puskesmas
Lepra/Kusta	orang	Rumah/RS/Puskesmas
HIV/AIDS	orang	Rumah/RS/Puskesmas
Gila/stress	orang	Rumah/RS/Puskesmas
TBC	orang	· Rumah/RS/Puskesmas
ISPA	orang	Rumah/RS/Puskesmas
Asma	orang	Rumah/RS/Puskesmas
	orang	Rumah/RS/Puskesmas

L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat

B. I G. Hombungan Datama dan I lasarana licschatan	- Elenoy arabac
Jumlah MCK Umum	unit
Jumlah Posyandu	/ unit
Jumlah kader Posyandu aktif	2orang
Jumlah pembina Posyandu	orang
Jumlah Dasawisma	Dasawisma
Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif	orang
Jumlah kader bina keluarga balita aktif	orang
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif	orang
Buku rencana kegiatan Posyandu	Diisi/tidak
Buku data pengunjung Posyandu	Diisi/tidak
Buku kegiatan pelayanan Posyandu	Diisi/tidak
Buku administrasi Posyandu lainnya	jenis
Jumlah kegiatan Posyandu	jenis
Jumlah kader kesehatan lainnya	orang
Jumlah kegiatan pengobatan gratis	jenis
Jumlah kegiatan pemberantasan sarang	
nyamuk/PSN	jenis
Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan	jenis
	jenis
	··

X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

A. Konflik SARA

Kasus konflik pada tahun ini	kasus
Kasus konflik SARA pada tahun ini	kasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian	
antar tetangga	kasus
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian	
antar RT/RW	kasus
Junilah konflik antar masyarakat pendatang	
dengan penduduk asli	kasus
Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam	
desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari	kasus
desa/kelurahan lain	ļ
Jumlah konflik antara masyarakat dengan	
nemerintah	kasus
Jumlah kerugian material akibat konflik antara	
masyarakat dan pemerintah	Rp
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara	orong.
masyarakat dengan pemerintah	orang
Jurnlah konflik antara masyarakat dengan	o mon a
perusahaan	orang
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara	07077
masyarakat dengan perusahaan	orang
Jumlah kerugian material akibat konflik antara	07077
masyarakat dar. pemerintah	orang
Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan	1000110
lembaga politik	kasus
Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara	orang
masyarakat dengan lembaga politik	orang

Jumlah kerugian material akibat konflik politik	
antara masyarakat dengan lembaga politik	Rp
Jumlah prasarana dan sarana yang	
rusak/terbakar akibat konflik Sara	buah
Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar	
akibat konflik Sara	rumah
Jumlah korban luka akibat konflik Sara	orang
Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara	orang
Jumlah janda akibat konflik Sara	orang
Jumlah anak yatim akibat konflik Sara	orang
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses	
secara hukum	orang
	·

B. Perkelahian

<u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini	kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa	kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah	kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian	
material	kasus
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses	
secara hukum	kasus

C. Pencurian

Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi	
tahur, ini	kasus
Kasus pencurian/perampokan yang korbannya	
penduduk Desa/Kelurahan setempat	kasus
Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya	
penduduk Desa/Kelurahan setempat	kasus
Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api	kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara	
hukum	orang

D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah

Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah	
yang korban dan pelakunya penduduk setempat	kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah	
yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya	
bukan penduduk setempat	kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah	
yang korban bukan penduduk setempat tetapi	
pelakunya penduduk setempat	kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara	
hukum	orang

E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan

Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan	
berjudi	orang
Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini	orang
	orang
Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan	
utang piutang	orang

F. Pemakaian Miras dan Narkoba	•
Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras	buah
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras	
Jumlah kasus mabuk akibat Miras	orang
Jumlah pengedar Narkoba	kasus
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba	orang
Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba	orang
Jumlah kasus kematian akibat Narkoba	kasus
Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses	kasus
secara hukum	orona
Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses	orang
secara hukum	() TO TO
	orang
G. Prostitusi	
Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat	orang
Lokalisasi prostitusi	Ada/tidak
Jumlah tempat yang menyediakan wanita	
pramunikmat secara terselubung (warung remang-	
remang, panti pijat, hotel, dll)	buah
Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek	kasus
prostitusi	
Jumlah pembinaan pelaku prostitusi	kali/
Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi	kali/
H. Pembunuhan	
Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini	orang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban	
penduduk Desa/Kelurahan setempat	kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku	
penduduk setempat	kasus
Jumlah kasus bunuh diri	kasus
Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum	1kasus
I. Penculikan	
Jumlah kasus penculikan	kasus
Jumlah kasus penculikan dengan korban	
penduduk Desa/Kelurahan setempat	kasus
Jumlah kasus penculikan dengan pelaku	
penduduk setempat	kasus
Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara	
hukum	kasus
J. Kejahatan seksual	
Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini	kasus
Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini	kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut	kasus
hukum negara	
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut	
hukum adat	kasus
Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar	
bagi pekerja seks	unit
K. Masalah Kesejahteraan Sosial	
Jumlah gelandangan	orang
Jumlah pengemis jalanan	orang
Jumlah anak jalanan dan terlantar	orang
Jumlah manusia lanjut usia terlantar	orang
Jumlah orang gila/stress/cacat mental	6orang

Jumlah orang cacat fisik	orang
Jumlah orang kelainan kulit	orang
Jumlah orang yang tidur di kolong	
jembatan/emperan	orang
Jumlah rumah dan kawasan kumuh	unit
Jumlah panti jompo	unit
Jumlah panti asuhan anak	unit
Jumlah rumah singgah anak jalanan	unit
Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota	orang
Jumlah penghuni bantaran sungai	orang
Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api	orang
Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum	
lainnya	orang
Jumlah anggota kelompok masyarakat/ suku/	
keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif	orang
Jumlah anak yatim usia 0 – 18 tahun	3.2orang
Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun	21orang
Jumlah anak yatim piatu 0 - 18 tahun	24orang
Jumlah janda	2/orang
Jumlah duda	1.7orang
Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran	orang
Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah	
di SD/sederajat	10orang
Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah	_
Jumian anak usia 15-15 tahun yang duak sekolah	orang
di SLTP/sederajat	······································
Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah	
di SLTA/sederajat	orang
Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga	418
menghasilkan uang	48orang
Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga	3.9orang
Jumlah penduduk eks NAPI	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan	
bencana banjir	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan	
bencana gunung berapi	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan	
bencana tsunami	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan	
bencana gempa bumi	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan	
bencana kebakaran rumah	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan	
hencana kekekeringan	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan	orong
bencana tanah longsor	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan	
bencana kebakaran hutan	orang
Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air	
bersih	orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis	
dan tanous	orang
Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat	00000
penduduk dan kumuh	orang
Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki	orena
keterangan penduduk	orang
Jumlah warga pendatang dan atau pekerja	orang
musiman	orang

L. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri	kasus
Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami	kasus
Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak	kasus
	kasus
Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap	
anggota keluarga lainnya	kasus

M. Teror dan Intimidasi

Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan	kasus
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota	
masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan	kasus
Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang	erical Steet
bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan	kasus
•	······································
ketakutan penduduk	
Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan	
kelurahan tahun ini	kasus
Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak	
kelompok tertentu kepada masyarakat	kasus
Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi	
serta hasutan di masyarakat baik secara adat	
maupun hukum formal	kasus
in a pari	

N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta

Organisasi Siskamling	Ada/tidak
Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan	Ada/tidak
Masyarakat	
Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada	
Siskamlimg/Pos Ronda	RT
Jumlah anggota Hansip dan Linmas	orang
Jadwal kegiatan Siskanıling dan Pos Ronda	Ada/tidak
Buku anggota Hansip dan Linmas	jenis
Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM)	
swasta	unit
Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan	
Kades/Lurah	kegiatan
Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan	Pos

XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT

A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara

'i 'Id-deri Doncosile	
Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila	jenis
sebagai Dasar Negara	
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi	1
Pancasila sebagai Dasar Negara	kegiatan
Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka	
	jenis
Tunggal Ika	
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka	kegiatan
Tunggal Ika	Kcgiataii
Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa	iania
lainnya	jenis
Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa	
	kegiatan
lainnya la disaburahan yang minta	
Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta	kasus
suaka/lari ke luar negeri	1

Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara	
tetangga secara resmi	orang
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara	_
tetangga secara tidak resmi	orang
Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar	
kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara	kasus
dengan warga/aparat dari desa/kelurahan Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik	Rasus
masyarakat oleh kelompok pengacau di	
desa/kelurahan perbatasan negara tetangga	kasus
Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong	·
keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di	
	kasus
desa/kelurahan tahun ini Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas	······RASUS
serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan	kasus
Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan	
antar negara yang terjadi tahun ini	kasus
Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan,	
perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi	
di desa/kelurahan perbatasan antar negara	kasus
Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang	
terjadi desa/kelurahan ini	kasus
Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik	
antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun	
antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan	1
desa/kelurahan antar provinsi.	kasus
Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar	
negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke	
pemerintah tingkat atasnya	kasus
Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan	
disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI,	
Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika	
yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala	,
Desa/Lurah : 1:	kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di	1.0000
wilayah perairan desa/kelurahan	kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/	
peternak/pekebun/perambah hutan asal desa/	
kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara	kasus
lain	

B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi

D. Resaddian moniograph cohogoi kewenangan dan	jenis
Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan	
atau tugas desa/kelurahan	1000
Jumlah Wajib Pajak	267 orang
Target PBB	Rp
Realisasi PBB	%
Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB	tindakan
Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan	jenis
kewenangan desa/kelurahan	
Jumlah wajib retribusi yang menjadi	orang
tugas/kewenangan desa/kelurahan	<u> </u>
Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan	Rp
desa/kelurahan	
Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan	%
Troumous Transfer	

desa/kelurahan "	
Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan	jenis
Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan	Rp
Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan	%
Jumlah kasus pungutan liar	kasus
Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar	kasus

C. Partisipasi Politik

1. Jumlah Partsi Politik dan Pemilihan Umum

1. Juman Parter Politik dan Temminan emam	
Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih	.1.6.2.6orang
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih	
pada pemilu legislatif yang lalu	orang
Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan	
ini yang aktif di partai politik	orang
Jumlah partai politik yang memiliki pengurus	
sampai di Desa/Kelurahan ini	partai
Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di	
wilayah desa/kelurahan ini	partai
Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai	
politik dari desa/kelurahan	orang
Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu	
Legislatif yang lalu	orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam	
pemilihan presiden/wakil	pemilih

2. Pemilihan Kepala Daerah

Zi I Chilina and Fare Care Care Care Care Care Care Care C	
Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih	orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam	
pemilu Bupati/Walikota lalu	pemilih
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam	
pemilu Gubenur yang lalu	pemilih

3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan

Penentuan Jabatan Kepala Desa	 Dipilih Masyarakat secara langsung Dipilih oleh perwakilan masyarakat Ditunjuk Pemerintah Tingkat Atas Diangkat turun temurun oleh masyarakat setempat
Penentuan Sekretaris Desa	1.) Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota 2. Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota 3. Diusulkan oleh Kepala Desa, Dipilih, Diangkat dan Ditetapkan oleh Bupati/Walikota
Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun	1. Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta disahkan Camat 2. Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Desa serta dilaporkan ke Camat

	3. Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Camat/Kepala Distrik/Sebutan lain
Masa jabatan Kepala Desa	tahun
Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala	1. Ditunjuk dan diangkat oleh Camat sesuai Delegasi Kewenangan dari Bupati/Walikota
Lingkungan	2. Ditunjuk dan diangkat oleh Bupati/Walikota secara langsung

4. Pemilihan BPD

4. Pemilihan BPD	
Jumlah anggota BPD	orang
Penentuan anggota BPD	1. Dipilih masyarakat secara langsung
·	(2.) Dipilih oleh perwakilan masyarakat
	udesa secara musyawarah dan
	mufakat
	3. Ditunjuk oleh Kepala Desa/Camat
	dan unsur lanilla
	4. Disahkan melalui keputusan
	Bupati/Walikota
Pimpinan BPD	(1.) Dipilih dari dan oleh anggota BPD
	secara langsung
	2. Dipilih oleh Kepala Desa dan setujui
	Camat
	3. Ditunjuk Camat
	4. Dipilih oleh rakyat secara langsung
	dari para anggota BPD
Pemilikan kantor/ruang kerja BPD	
Anggaran untuk BPD	Ada/ tida k
Produk keputusan BPI	
tahun ini	2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 2. kali
	3. Rancangan Peraturan Desa buah
	4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
	kali
	5. Menyatakan pendapat kepada
	Kepala Desa kali
	6. Menyampaikan usul dan pendapat
	kepada Kepala Desa kali
	7. Mengevaluasi efektivitas
	pelaksanaan APB Desa kali

5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan

01 1 0111111111111111111111111111111111					
Keberadaan organis	asi	lembaga			
kemasyarakatan desa/ke	lurahar	າ	Ad	a/tidak	
Dasar hukum kebera	adaan	Lembaga	1.	Perdes	
Kemasyarakatan Desa/L		_	2.	Keputusan	Kepala
				Desa	
			3.	Keputusan Car	nat.
			/4.	Belum diatur	
				£	

	·•
Jumlah organisasi anggota lembaga	
kemasyarakatan desa termasuk RT, RW,	
PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna,	
Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani	
dan lembaga lainnya sesuai ketentuan	unit organisasi
Dasar hukum pembentukan Lembaga	1. Keputusan Lurah
Kemasyarakatan Kelurahan/LKK	2 Keputusan Camat
Tientady aranacan reducation, bitte	
Years	(3.) Belum diatur
Jumlah organisasi anggota lembaga	
kemasyarakatan kelurahan	unit organisasi
Pemilihan pengurus LKD/LKK	1 Dipilih oleh rakyat
	secara langsung
	2. Ditunjuk dan diangkat
	olch Kepala Desa/
	Lurah
	3. Ditunjuk dan Diangkat
	oleh Camat
Pemilihan pengurus organisasi anggota	1 Dipilih oleh rakyat
LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K,	secara langsung
Karang Taruna, RT, RW, Bumdes,	2. Ditunjuk dan diangkat
lembaga adat, kelompok tani dan	oleh Ketua LKD/LKK
organisasi anggota LKD/LKK lainnya	3. Ditunjuk dan diangkat
0.08	oleh Kepala Desa/
	Lurah
	4. Ditunjuk dan Diangkat
	oleh Camat
Y 1	ofen Camat
Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban	A14:6/4:1-1
LKD/LKK	Aktif/ tida k
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	
LKD/LKK	kegiatan
Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga	
kemasyarakatan yang dijalankan	
organisasi anggota LKD/LKK	Aktif / tidak
Jumlah kegiatan lembaga	
kemasyarakatan yang dijalankan	
organisasi anggota LKD/LKK	kegiatan
Alokasi anggaran untuk LKD/LKK	Ada/tidak
Alokasi anggaran untuk organisasi	
anggota LKD/LKK termasuk PKK,	
LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW,	
kelompok tani dan organisasi lainnya	Ada/tidak
Kantor dan ruangan kerja untuk	
LKD/LKK	Ada/tidak
Dukungan pembiayaan, personil dan ATK	
untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-	·
Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD	
Designation of the property of	-
Realisasi program kerja organisasi	%
anggota LKD/LKK	
Keberadaan Alat kelengkapan organisasi	
anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma	
dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan	terisi semuanya
terisi tidaknya struktur organisasi	
anggota LKD/LKK	
Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan	Warfungsi / tidak
LKD/LKK	Berfungsi/tidak

D. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan

Jumlah musyawarah narangaran narahan	
Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan	
tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun	6
ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan	6kali
Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali	
musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan	
desa/kelurahan	45%
	70
Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di	45
desa/kelurahan	%
Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa	
dan kelurahan	40 %
Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan	
pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan	50 %
Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber	
data dasar yang digunakan dalam perencanaan	, , , ,
pembangunan desa dan forum Musrenbang Partisipatif	Ya/tidak
Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam	
perencanaan pembangunan partisipatif dan	
Musrenbang di desa dan Kelurahan	Ya/tidak
Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil	
desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang	
	Vo /+idal-
partisipatif	Ya/tidak
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana	<i></i>
Kerja Desa dan Kelurahan	50%
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui	
menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat	50 %
dalam RAPB-Desa	70 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari	
pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang	
dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk	
dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat	90 %
dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang	
ditolak dalam Musrenbangdes/kel	kegiatan
Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ada/ tidak
Desa/Kelurahan (RKPD/K)	Aua/ traan
Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah	A -1 - /4! -1 - 1 -
Desa/Kelurahan (RPJMD/K)	Ada/tidak
Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa	
dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat	
atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD	
Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari	
perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan	Ada/tidak
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui	
forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan	
dalam APB-Desa, APB-Daerah kabupaten/Kota dan	
· ·	kegiatan
provinsi	
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui	
forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak	
sesuai dengan hasil Musrenbang	lkegiatan

2. Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan

pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan	
Musrenbang Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketetapan dalam APB-Desa Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menincaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat untuk menyelesaikan atau menincaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan asecara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan		
Jumlah penduduk yang diibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketetapan dalam APB-Desa Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat untuk menbaga kemasyarakatan desa/kelurahan kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan sewadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai		56
proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota		%
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketetapan dalam APB-Desa Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Usulan rencana Kerja posaram dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat untuk menyelesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan sekejatan di desa dan kelurahan yang didanai		_
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketetapan dalam APB-Desakegiatan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerahkegiatan Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbangkegiatan Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan% Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provirisi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menincaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan desa/kelurahan kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai		
dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketetapan dalam APB-Desa Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dilahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai		%
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat	
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provirsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menincaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan pembangunan yang diselesaikan pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang	
tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan nembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	sudah ada sesuai ketetapan dalam APB-Desa	kegiatan
tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan nembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga	
Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Usulan rencana kerja posa/Kelurahan Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahar Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai megiatan dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai megiatan di desa/kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai menjadi desa/kelurahan desa/kelurahan	,	
Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat Saat Musrenbang Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menincaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai Lumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai Lumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	•	kegiatan
yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menincaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jenis kegiatan masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan	Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar	
Saat Musrenbang Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jenis kegiatan masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai		20
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan hasil pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Limbah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai		%
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan unnjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	Heylan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana	2.6
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan dari desa dan kelurahan yang didanai		25 %
Usulan rencana kerja Desa/Kelurahan Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menincaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan dari APB-Desa dan segiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Limbah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	J	
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Limiah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai		60
pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai		%
pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari	
dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	pernerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang	
dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menincaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk	4
Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	dibarras saat indoronsang dan deburahan oleh masyarakat	50 %
menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	dilaksanakan di desa dan kelulahan oleh masyarakat	
pembangunan yang sudah ada Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	Penyelenggaraan musyawaran desa/keluranan untuk	
Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	menerima, memelihara dan melestarikan hasil	
Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	pembangunan yang sudah ada	Ada/t ida k
menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	Beleksansan kegiatan dari masyarakat untuk	
belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya. Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	relaksallaali kegiatan dari maj menindaklanjuti kegiatan yang	·
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	menyeresarkan atau memmetahanjan megatahan jamp	Ada/tidak
pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Lumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai Lumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	beium diselesaikan oleh pelaksana seberah yar	
lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/ kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Lumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai Lumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai		
Kepala Desa/Lurah Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau	
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	lembaga kemasyarakatan desa/kelulahan kepada	Kasus
pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/ kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	Kepala Desa/Luran	111111111111111111111111111111111111111
kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai		
kelurahan Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/	1
pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	kelurahan	
pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan	
secara hukum Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	the state of the s	
Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	pomoanbarran	kasus
pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan	secara nukum	
desa/kelurahan Jenis Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan kegiatan Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai		
Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	1 1	Tanin
Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	desa/kelurahan	
swadaya masyarakat di kelurahan kegiatan li desa dan kelurahan yang didanai	Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan	
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	swadaya masyarakat di kelurahan	Regiatari
I THITTIAL KEPIALAH UL UCUK KKA 1-24K WITTE J. U	Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didana	i
kegiatan	Juman Registan di desa dan Rota di Juman J	kegiatan
	dari APB Daeran Kabupaten/ Kota	
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanaikegiatan	Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didaha	kegiatar
	dari APBD Provinsi	
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai	Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didana	leasintar
APBNkegiatan		kegiatan

3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk

Jumlah kelompok arisan	buah
Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh	orang
Ada tidaknya dana sehat	Ada/tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau	
sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah	Ada/tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau	
sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah	Ada/tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau	
sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan	
anak sekolah/kuliah/kursus	Ada/tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau	1
sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas	
umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana	Ada/tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau	
sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha	Ada/tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau	
sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan	
kebun	Ada/tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau	
sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan	
usaha peternakan lainnya	Ada/tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau	
sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban,	A -1 - /4: -1 - 1
ketentraman dan keamanan	Ada/tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau	٨ ما م (4: ما م اء
sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian	Ada/tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga	Ado/tidola
kebersihan Desa/Kelurahan	Ada/tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi	Ada/tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau	Ada/ tidak
sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang	
nyamuk dan kesehatan lingkungan lainnya	Ada/tidak
Ada tidaknya kerjasama antar Desa/Kelurahan	Ada/tidak
Ada tidaknya penyelesaian perselisihan antar	1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
desa/kelurahan	Ada/tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong dalam	
penyelesaian konflik di setiap desa/kelurahan oleh	
masyarakat sendiri	
Ada tidaknya gotong royong dalam menolong keluarga	
tidak mampu dan fakir miskin di desa dan kelurahan	Ada/tidak
Ada tidaknya kegiatan Kepala Desa sebagai Hakim	
Perdamaian Desa	Ada/tidak
Kegiatan gotong royong dalam penanggulangan	
bencana	Ada/tidak
Kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan	١- ١- ١- ١- ١- ١- ١- ١- ١
bulan bhakti gotong royong	Ada/tidak

4. Adat Istiadat

Adat istiadat dalam perkawinan	Aktif/tidak/pernah ada
Adat istiadat dalam kelahiran anak	Aktif/tidak/pernah ada
Adat istiadat dalam upacara kematian	Aktif/tidak/pernah ada
Adat istiadat dalam pengelolaan hutan	Aktif/tidak/pernah ada

Adat istiadat dalam tanah pertanian	Aktif/tidak/pernah ada
Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai	Aktif/tidak/pernah ada
Adat istiadat dalam memecahkan kenflik	
warga	Aktif/tidak/pernah ada
Adat istiadat dalam menjauhkan bala	
penyakit dan bencana alam	Aktif/tidak/pernah ada
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan	
antara alam semesta dengan manusia dan	
lingkungannya	Aktif/tidak/pernah ada
Adat istiadat dalam penanggulangan	
kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir	
miskin/terlantar	Aktif/tidak/pernah ada

5. Sikap Dan Mental Masyarakat

Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar ———————————————————————————————————		
Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lain kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya. Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola Ya/tida	,	
Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola Ya/tidak	sudut jalanan	jenis
Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya. Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola		
rumah Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya. Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola Ya/tidak		jenis
Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya. Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Pangat tidak dikelola Ya/tidak		A 1 // 1 1
Remakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya. Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola		Ada/tidak
Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya. Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Senyak lahan terlantar yang tidak dikelola		A 1 //: 1 1
mencari uang secara gampang walau tidak halal Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya. Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola		Ada/tidak
Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada wargajenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada wargajenis pungutan dari desa/kelurahan kepada wargajenis pungutan dari desa/kelurahan kepada wargajenis pungutan dari desa/kelurahan kepada wargakasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya		W = /A! A = 1.
Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya. Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola	mencari uang secara gampang walau tidak halal	<u>*a/tidak</u>
Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya. Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Jenisa dasa sepada marga. Jenisa dari ya/tidak dikelola	Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada	
Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya. Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Jenisa dasa saus		jenis
Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya.	Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada	
Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya. Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Ya/tidal		jenis
dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya. Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola	Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga	
Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Pa/tidal Ya/tidal Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola	Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa	
Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Ya/tida Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola	dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan	,
Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Ya/tida Ya/tida Ya/tida Ya/tida	liar, pemerasan dan sejenisnya.	kasus
Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Ya/tida Ya/tida Ya/tida Ya/tida	Dipindah karena kena kasus pungutan liar,	1
Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola *Aytida*	pemerasan dan sejenisnya	kasus
Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Pa/tida Ya/tida Ya/tida Ya/tida	Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus	1
Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola **A/tida** **A/tida**	pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	kasus
Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Ya/tidal Ya/tidal	Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan	,
yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola Ya/tida	sejenisnya	
terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola Ya/tidak	Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari	
Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola Ya/tidak	yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan	
Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola Ya/tida	terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di	Wadtidak
gratis dari aparat desa/kelurahan Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola	kantor desa/kelurahan	
Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola Ya/tida	Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayahan	Va/tidak
kualitas pelayanan kepada masyarakat Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola Ya/tida	gratis dari aparat desa/keluranan	
Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola Ya/tida	Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya	Wow/tidak
yang diinisiatifi masyarakat sendiri Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola	kualitas pelayanan kepada masyarakat	
Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola Ya/tida	Banyak kegiatan yang bersilat hiburah dan rekreasi	Va/tidal
kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola Ya/tida	yang diinisiatifi masyarakat sendiri	
kelompok kepentingan lain Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola Ya/tida	Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan	
Etos Kerja Penduduk Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola Ya/tida		Ya/tidak
Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas Ya/tida Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola Ya/tida		Tree, cidai
Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola ¥a/tida	Etos Kerja Penduduk	Va/tidal
Banyak aman terlaman yang dadar		
perminknya/petam berdasi	Danyak karan	
	pemiliknya/ petaili berdasi	

Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan	Ya/tidak
Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak	14/114411
dimanfaatkan	Ya/tidak
Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang	
pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain	Tinggi/rendah
Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang	
memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk	
mencari pekerjaan lain	Tinggi/rendah
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar	
desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah	
kabupaten/kota	Ya/tidak
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota	
besar lainnya	Ya/tidak
Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan	
menghadirkan undangan yang banyak	Tinggi/sedang
Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah	
menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan	Tinggi/sedang
bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan	/rendah
Kebiasaan masyarakat untuk mencari/	
mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/	·
jagung pada saat rawan pangan/ kelaparan/gagal	Tinggi/sedang
panen	/rendah
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar	Tinggi/sedang
untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu	/rendah
Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes	Tinggi/sedang
terhadap kebijakan pemerintah	/rendah
Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu	
yang menyesatkan	Sering/jarang
Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk	
menyelesaikan berbagai persoalan sosial	Tinggi/sedang
learn a arranalea to n	/rendah
Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/	
apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan	•
sekitarnya	Y-a-/tidak
Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih	
di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang	
kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi	
masyarakat	/rendah

 $i\epsilon$

XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN

A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN		
Keberadaan organisasi Lembaga		
Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK	Ada/tidak	
Kepengurusan	Aktif/tidak	
Jumlah kegiatan	Jenis	
Buku administrasi lembaga kemasyarakatan	jenis- Terisi/tidak	
Jumlah organisasi anggota lembaga	Organisasi	
kemasyarakatan desa/kelurahan		
B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN		
1. LKMD/LPM ATAU SEBUTAN LAIN	Ada/Tidak	
Kepengurusan	Aktif/tidak	
Buku administrasi	Jenis	
Jumlah kegiatan	Jenis	

2. PKK	Ada/Tidak
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	Jenis
Kelengkapan organisasi Dasawisma	Lengkap/tidak
Kelengkapan organisasi Pokja	Lengkap/tidak
3. Karang Taruna	Ada/Tidak
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	Jenis
4. RT	Ada/T ida k
	Aktif/tidak
Kepengurusan Buku administrasi	Data dan Tamu Jenis
	Jenis
Jumlah kegiatan	
5. RW	Ada/Tidak
	Aktif/tidak
Kepengurusan Buku administrasi	Jenis
	Jenis
Jumlah Kegiatan	
6 Tambaga adat	Ada/Tidak
6. Lembaga adat	Aktif/tidak
Kepengurusan Buku administrasi	Jenis
	Jenis
Jumlah Kegiatan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
7. BUMDES	Ada/Tidak
	Aktif/tidak
Kepengurusan Buku administrasi	Jenis
	Jenis
Jumlah Kegiatan	
8. Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan	Ada/Tidak-
Masyarakat	01-4:5/4:d-1-
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	
	Ada/Tidak
9. Posyandu	Aktif/tidak
Kepengurusan	Jenis
Buku administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	
10 Valorende Toni / Nolovon	Ada/Tidak
10. Kelompok Tani/Nelayan	Aktif/tidak
Kepengurusan	Jenis
Buku administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	
11 Organicaci Parampuan	Ada/Tidak
11. Organisasi Perempuan	Aktif/tidak
Kepengurusan Buku administrasi	Jenis
	Jenis
Jumlah kegiatan	
12. Organisasi Pemuda	Ada/Tidak
Kepengurusan	Aktif/tidak

Buku administrasi	¥
Jumlah kegiatan	Jenis
Outman Regiatan	Jenis
10 0	
13. Organisasi profesi	Ada/Tidak
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	Jenis
14. Organisasi Bapak	Ada/T ida k
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	Jenis
15 V. I. Colombia	
15. Kelompok Gotong Royong	Ada/Tidak
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	Jenis
16. Posyantekdes	Ada/tidak -
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku administrasi	Jenis
	Jenis
Jumlah kegiatan	
17. Organisasi Keagamaan	Ada/tidak -
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	Jenis
18	Ada/Tidak
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku administrasi	Jenis
	Jenis
Jumlah kegiatan	
19	
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	Jenis
Dasar hukum pembentukan Lembaga	Peraturan
Kemasyarakatan Desa (LKD)	Desa/tidak
	Peraturan
Dasar hukum pembentukan lembaga	Daerah/tidak
kemasyarakatan kelurahan (LKK)	Peraturan Desa/
Dasar hukum pembentukan organisasi anggota	Peraturan Daerah
lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	1. Crataran Basian

XIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

A. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan

Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini	Rp. 1,267.672.677
Sumber Anggaran	N.
APBD Kabupaten/Kota	Rp
Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp
Bantuan Pemerintah Provinsi	Rp
Bantuan Pemerintah Pusat	Rp

Pendapatan Asli Desa	Rp
Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp
Alokasi Dana Desa	Rp
Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di	
desa/kelurahan	Rp
Sumber pendapatan lain yang sah dan	
tidakmengikat	Rp
Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan	Rp
Jumlah Belanja Aparatur/pegawai	Rp

B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah

Penyampaian laporan keterangan pertanggungan	
🗆 🗎 🗎 🖺 🖺 abora Kepala Desa 🖺 abora BPD	Ada/tidak
Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa	
dan lurah tentang Daboran penyelenggaraan	
tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa	
dan lurah Dabora masyarakat	jenis
Status laporan keterangan pertanggungjawaban	
kepala Desa	Diterima/ditolak
Laporan kinerja penyelenggaraan tugas,	
wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan	
lurah kepada Bupati/Walikota	Diterima/direvisi
Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa	
dan lurah kepada masyarakat	jenis
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap	
masalah pembangunan, pelayanan dan	
pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan	
kepada kepala desa/lurah	kasus
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap	,
masalah pembangunan, pelayanan dan	
pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan	
kepala desa/lurah	kasus

C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan

1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN			
Gedung Kantor	Ada/tidak- Kondisi		
	baik/rusak		
Jumlah ruang kerja	Ruang		
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya	Ada/tidak- Kondisia		
,	baik/rusak		
Listrik	Ada/tidak		
Air bersih	Ada/tidak		
Telepon	Ada/tidak		
1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor			
Jumlah mesin tik	buah		
Jumlah meja	buah		
Jumlah kursi	buah		
Jumlah almari arsip	buah		
Komputer	unit		
Mesin fax	unit		
Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa	unit		
Buku Data Perangkat Desa/Kelurahan	Ada/tidak-Terisi/tidak		
Perangkat Desa/Kelurahan	Lengkap/tidak		
Buku Peta Wilayah Desa/Kelurahan	Ada/tidak		

Mesin fax	unit
Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa	unit
Buku Data Perangkat Desa/Kelurahan	Ada/tidak-
- and	Terisi/tidak
Perangkat Desa/Kelurahan	Lengkap/tidak
Buku Peta Wilayah Desa/Kelurahan	Ada/tidak
Struktur organisasi	Ada/tidak
Kartu uraian tugas	Ada/tidak
rarta draiar tagas	Ada/ tidak
1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/ Kelu	rahan
Buku profil desa/kelurahan	Ada/tidak-
*	Diolah/tidak
Buku data Peraturan Desa/Peraturan Daerah	Ada/tidak-
	Terisi/tidak
Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah	Ada/tidak-
, and the same of	Terisi/tidak
Buku administrasi kependudukan	Ada/tidak-
1	Terisi/tidak
Buku data inventaris	Ada/tidak-
	Terisi/tidak
Buku data aparat	Ada/tidak-
	Terisi/tidak
Buku data tanah milik desa/tanah kas desa/	Ada/tidak-
milik kejurahan	Terisi/tidak
Buku administrasi pajak dan retribusi	Ada/tidak-
Bana daminonao, pigan dan remedo	Terisi/tidak
Buku data tanah	Ada/tidak-
Danit data tanan	Terisi/tidak
Buku laporan pengaduan masyarakat	Ada/tidak-
Bullu laporan pongadam maojaranat	Terisi/tidak
Buku agenda ekspedisi	Ada/tidak-
Dana agonia enopoaisi	Terisi/tidak
Buku profil desa/kelurahan	Ada/tidak-
Buna prom acca, noral anali	Terisi/tidak
Buku data induk penduduk	Ada/tidak-
Buku data muuk penaduan	Terisi/tidak
Buku buku data mutasi penduduk	Ada/tidak-
Dana data matasi penadami	Terisi/tidak
Buku rekapitulasi jumlah penduduk akhir	Ada/tidak-
bulan	Terisi/tidak
Buku registrasi pelayanan penduduk	Ada/tidak-
isalia regionaci polașania promuni	Terisi/tidak
Buku data penduduk sementara	Ada/tidak-
Dana data pondulus sistema	Terisi/tidak
Buku anggaran penerimaan	Ada/tidak-
Dana and Baran Property	Terisi/tidak
Buku anggaran pengeluaran pegawai dan	Ada/tidak-
pembangunan	Terisi/tidak
Buku kas umum	Ada/tidak-
Dania Mad amana	Terisi/tidak
Buku kas pembantu penerimaan	Ada/tidak-
Daka kao pembanta pemerimaan	Terisi/tidak
Buku kas pembantu pengeluaran rutin dan	
pembangunan	Ada/tidak-
THE HUDGIE GILGII	1 !

Buku data lembaga kemasyarakatan Buku data pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan Buku data pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan Buku data program dan kegiatan masuk desa/kelurahan Buku rencana kerja pembangunan desa/kelurahan Buku rencana pembangunan jangka menengah desa Buku kader pemberdayaan masyarakat Buku kegiatan pembangunan Ada/tidak- Terisi/tidak Buku kegiatan pembangunan Ada/tidak- Terisi/tidak Buku inventaris proyek Ada/tidak- Terisi/tidak Buku APB-Desa/Anggaran Kelurahan Ada/tidak- Terisi/tidak Ada/tidak- Terisi/tidak	
Buku data pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan Buku data program dan kegiatan masuk desa/kelurahan Buku rencana kerja pembangunan Ada/tidak-Terisi/tidak Buku rencana pembangunan jangka Mad/tidak-Terisi/tidak Buku rencana pembangunan jangka Ada/tidak-Terisi/tidak Buku kader pemberdayaan masyarakat Buku kegiatan pembangunan Buku kegiatan pembangunan Buku inventaris proyek Buku APB-Desa/Anggaran Kelurahan Ada/tidak-Terisi/tidak Buku APB-Desa/Anggaran Kelurahan Ada/tidak-Terisi/tidak Buku APB-Desa/Anggaran Kelurahan Ada/tidak-Terisi/tidak Ada/tidak-Terisi/tidak Ada/tidak-Terisi/tidak Ada/tidak-Terisi/tidak Ada/tidak-Terisi/tidak Ada/tidak-Terisi/tidak Ada/tidak-Terisi/tidak	
kemasyarakatan Buku data program dan kegiatan masuk desa/kelurahan Buku rencana kerja pembangunan desa/kelurahan Buku rencana pembangunan jangka menengah desa Buku kader pemberdayaan masyarakat Buku kegiatan pembangunan Buku kegiatan pembangunan Ada/tidak- Terisi/tidak Buku kegiatan pembangunan Ada/tidak- Terisi/tidak Buku inventaris proyek Ada/tidak- Terisi/tidak Buku APB-Desa/Anggaran Kelurahan Ada/tidak- Terisi/tidak Loket pelayanan Ada/tidak- Terisi/tidak	
Buku data program dan kegiatan masuk desa/kelurahan Buku rencana kerja pembangunan Ada/tidak- Buku rencana pembangunan jangka Buku rencana pembangunan jangka menengah desa Buku kader pemberdayaan masyarakat Buku kegiatan pembangunan Ada/tidak- Terisi/tidak Buku kegiatan pembangunan Ada/tidak- Terisi/tidak Buku inventaris proyek Ada/tidak- Terisi/tidak Buku APB-Desa/Anggaran Kelurahan Ada/tidak- Terisi/tidak Loket pelayanan Ada/tidak- Terisi/tidak	
desa/kelurahanTerisi/tidakBuku rencana kerja pembangunan desa/kelurahanAda/tidak- Terisi/tidakBuku rencana pembangunan jangka menengah desaAda/tidak- Terisi/tidakBuku kader pemberdayaan masyarakatAda/tidak- Terisi/tidakBuku kegiatan pembangunanAda/tidak- Terisi/tidakBuku inventaris proyekAda/tidak- Terisi/tidakBuku APB-Desa/Anggaran KelurahanAda/tidak- Terisi/tidakLoket pelayananAda/tidak- Terisi/tidak	
Buku rencana kerja pembangunan desa/kelurahan Buku rencana pembangunan jangka menengah desa Buku kader pemberdayaan masyarakat Buku kegiatan pembangunan Buku kegiatan pembangunan Ada/tidak- Terisi/tidak Buku inventaris proyek Buku inventaris proyek Buku APB-Desa/Anggaran Kelurahan Ada/tidak- Terisi/tidak Loket pelayanan Ada/tidak- Terisi/tidak Ada/tidak- Terisi/tidak	
desa/kelurahan Buku rencana pembangunan jangka menengah desa Buku kader pemberdayaan masyarakat Buku kegiatan pembangunan Buku kegiatan pembangunan Ada/tidak- Terisi/tidak Buku inventaris proyek Buku inventaris proyek Ada/tidak- Terisi/tidak Buku APB-Desa/Anggaran Kelurahan Ada/tidak- Terisi/tidak Loket pelayanan Ada/tidak-	
Buku rencana pembangunan jangka menengah desa Buku kader pemberdayaan masyarakat Buku kegiatan pembangunan Buku inventaris proyek Buku inventaris proyek Buku APB-Desa/Anggaran Kelurahan Loket pelayanan Ada/tidak- Terisi/tidak Ada/tidak- Terisi/tidak Ada/tidak- Terisi/tidak	
menengah desa Buku kader pemberdayaan masyarakat Buku kegiatan pembangunan Buku kegiatan pembangunan Ada/tidak- Terisi/tidak Buku inventaris proyek Buku APB-Desa/Anggaran Kelurahan Ada/tidak- Terisi/tidak Loket pelayanan Ada/tidak-	
menengah desa Buku kader pemberdayaan masyarakat Buku kegiatan pembangunan Buku kegiatan pembangunan Ada/tidak- Terisi/tidak Buku inventaris proyek Buku APB-Desa/Anggaran Kelurahan Ada/tidak- Terisi/tidak Loket pelayanan Ada/tidak-	
Buku kegiatan pembangunan Buku inventaris proyek Buku inventaris proyek Buku APB-Desa/Anggaran Kelurahan Loket pelayanan Terisi/tidak Ada/tidak- Terisi/tidak Ada/tidak- Terisi/tidak	
Buku kegiatan pembangunan Ada/tidak- Terisi/tidak Buku inventaris proyek Ada/tidak- Terisi/tidak Buku APB-Desa/Anggaran Kelurahan Ada/tidak- Terisi/tidak Loket pelayanan Ada/tidak-	
Buku inventaris proyek Buku APB-Desa/Anggaran Kelurahan Loket pelayanan Terisi/tidak Ada/tidak- Terisi/tidak Ada/tidak- Terisi/tidak	
Buku inventaris proyek Buku APB-Desa/Anggaran Kelurahan Loket pelayanan Ada/tidak- Terisi/tidak Ada/tidak- Ada/tidak-	
Buku APB-Desa/Anggaran Kelurahan Loket pelayanan Terisi/tidak Terisi/tidak Ada/tidak-	
Buku APB-Desa/Anggaran Kelurahan Ada/tidak- Terisi/tidak Loket pelayanan Ada/tidak-	
Loket pelayanan Terisi/tidak Ada/tidak-	
Loket pelayanan Ada/tidak-	
1.01.01/ !!!	
Kotak Pengaduan Masyarakat Ada/tidak-	
Terisi/tidak	
Papan informasi pelayanan Ada/tidak-	
Terisi/tidak	
Laporan kinerja tahunan Ada/tidak	
Laporan akhir jabatan/memori jabatan Ada/tidak	
lurah/desa	
Laporon Dulan desa 13T ada.	
Caporan keadaan Penduduk desaada	
2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWA	ARATAN
DESA/BPD Gedung Kantor Ada/tidak	
Ruangan Kerja Ada/tidak-Ko baik/rusak	TTUTSI
Listrik Ada/tidak	
LAGA / fidav	
Air bersih Ada/tidak Talapan Ada/tidak	
Air bersih Telepon Ada/tidak Ada/tidak	
Telepon Ada/tidak	
Telepon Ada/tidak 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor	buah
Telepon Ada/tidak 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik	
Telepon Ada/tidak 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja	buah
Telepon Ada/tidak 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi	buah buah
Telepon Ada/tidak 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah almari arsip	buah buah buah
Telepon Ada/tidak 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah almari arsip Komputer Ada/tidak	buah buah buah buah
Telepon Ada/tidak 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah almari arsip Komputer Mesin fax	buah buah buah buah
Telepon Ada/tidak 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah almari arsip Komputer Mesin fax 2. B. Administrasi BPD	buah buah buah buah
Telepon Ada/tidak 2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor Jumlah mesin tik Jumlah meja Jumlah kursi Jumlah almari arsip Komputer Mesin fax	buah buah buah buah

	Terisi/tidak
Buku data kegiatan BPD	Ada/tidak-
3	Terisi/tidak
Buku Sekretariat BPD	Ada/tidak-
	Terisi/tidak
Buku Data Keputusan BPD	Ada/tidak-
•	Terisi/tidak
	Terisi/tidak
1	
3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LII	NGKUNGAN/SEBUTAN
LAIN	
1	
Gedung kantor atau Balai Pertemuan	Ada/Tidak- Kondisi
	baik/rusak
Alat tulis kantor	Aktif/tidak
Barang inventaris	Jenis
Buku administrasi	Jenis
Jenis kegiatan	jenis
Jumlah pengurus	orang
Jumlah ruang kerja	Ruang
Balai Dusun/Lingkungan/sejenisnya	Ada/Tidak- Kondisi
	baik/rusak
Listrik	Ada/tidak
Air bersih	Ada/tidak
Telepon	Ada/tidak
3.A. Inventaris dan Alat tulis kantor	
Jumlah mesin tik	buah
Jumlah meja	buah
Jumlah kursi	buah
Jumlah almari arsip	buah
Komputer	buah
Mesin fax	buah

D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Pedoman dan standar pelaksanaan urusan	
pemerintahan desa, kelurahan, lembaga	Ada/tidale
kemasyarakatan	Ada/tidak
Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari	
pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	. 1 //: 1 1
kenada desa dan kelurahan	Ada/tidak
Pedoman umum administrasi, tata naskah dan	
pelaporan bagi kepala desa dan lurah	Ada/tidak
Dedomen dan standar tanda jabatan, pakaian dinas	
dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan Perangkat	
Desa/Kelurahan serta BPD	Ada/tidak
Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi	
pemerintahan desa, kelurahan, lembaga	
kemasyarakatan dan perangkat masing-masing	Ada/tidak
supervisi dan konsultasi	
pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta	
peraksariaari perierittari usus	

pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	kegiatan	
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang	•	
penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	kegiatan	
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan		
pemerintahan desa dan kelurahan	kegiatan	
Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya		
percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan		
kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga,		
penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan,		
percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan		
prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan,		
pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat		
guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di		
desa dan kelurahan yang dibiayai APBN	jenis	
Pemberian penghargaan atas prestasi yang	kali	
dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan	·	
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga		
kemasyarakatan		
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan	kali	
kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing		

2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari	
provinsi ke desa/kelurahan	Ada/ tidak
Pedoman bantuan keuangan dari provinsi	
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat	
hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat	
beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan	
pemerintahan desa/kelurahan	Ada/tidak
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata	
naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	Ada/t idak
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang	
penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	1
berskala provinsi	\. kegiatan
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai	jenis
APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	ionio
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD	jenis
Provinsi untuk desa dan kelurahan	
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang	jenis
dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	
Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan	
kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk	
desa dan kelurahan	Ada/tidak-
Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan	1 '
pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai	
APBD Provinsi di desa dan kelurahan	Ada/tidak-
Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat	jenis
n i de la	
Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil	jenis
desa dan kelurahan	
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan	jenis
kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing Pemberian penghargaan atas prestasi yang	
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan	
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga	
kemasyarakatan	
nonino ja anama	

3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan

 \tilde{f}_{ℓ}^{z}

Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota Ada/tidak- yang diserahkan pengaturannya kepada desa Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Ada/tidak- kabupaten/kota kepada desa Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, Ada/tidak- peraturan kepala desa, keputusan Lurah danjenis
Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota Ada/tidak- yang diserahkan pengaturannya kepada desajenis Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Ada/tidak- kabupaten/kota kepada desajenis Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, Ada/tidak-
Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota Ada/tidak- yang diserahkan pengaturannya kepada desajenis Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Ada/tidak- kabupaten/kota kepada desajenis Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, Ada/tidak-
yang diserahkan pengaturannya kepada desajenis Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Ada/tidak- kabupaten/kota kepada desajenis Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, Ada/tidak-
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Ada/tidak- kabupaten/kota kepada desajenis Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, Ada/tidak-
kabupaten/kota kepada desajenis Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, Ada/tidak-
Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, Ada/tidak-
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah.
Pedoman teknis penyusunan perencanaan Ada/tidak-
pembangunan partisipatif serta pengembanganjenis
lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat Ada/tidak-
hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adatjenis
beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan
pemerintahan desa/kelurahan
Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan Ada/tidak-
untuk desajenis
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata Ada/tidak-
naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurahjenis
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang Ada/tidak-
penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahanjenis
berskala kabupaten/kota
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai Ada/tidak-
APBD kabupaten/kota yang masuk desa danjenis
kelurahan
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Ada/tidak-
kabupaten/kota untuk desa dan kelurahanjenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang Ada/tidak-
dibiayai APBD kabupaten/kota di desa danjenis
kelurahan
Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda Ada/t idak -
jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa,jenis
Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat Ada/tidak-
hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adatjenis
beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan
pemerintahan desa/kelurahan
Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa Ada/tidak-
dan kelurahanjenis
Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi Ada/t idak-
desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desajenis
dan kelurahan
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai Ada/tidak-
nemerintahan desa dan kelurahan dalamjenis
penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan
lembaga kemasyarakatan
Pemberian sanksi atas penyimpungan yang dilakukan Ada/tidak-
kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing
Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta Ada/tidak-
anggaran kelurahan dan pendayagunaan asetkali
pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan
sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah

4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan

Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan	Ada/tidak-
desa dan peraturan kepala desa	lkali
Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata	Ada/tidak-
pemerintahan desa dan kelurahan	kali
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan	Ada/tidak-
pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan	Ada/tidak-
otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan	kali
kepada desa	-
Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan	Ada/tidak-
perundang-undangan	kali
Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data	Ada/tidak-
profil desa dan kelurahan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas,	Ada/tidak-
	kali
wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa,	Kan
BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan	Ada/tidak-
Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan	•
ketenteraman dan ketertiban umum	kali
Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas	Ada/ti dak-
pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga	kali
kemasyarakatan desa dan kelurahan	A 1 /
Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat	Ada/tidak-
dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan	kali
pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian	
hasil pembangunan.	
Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan	-Ada/tidak-
kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan	Ada/tidak-
kegiatan pemberdayaan masyarakat	kali
Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan	Ada/ tidak-
kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga	_Ada/tidak-
kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan	kali
dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan	
serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan	
keberdayaan masyarakat	
Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan	Ada/tidak-
pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan	kali
organisasi anggotanya	
Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan	Ada/tidak-
dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan	kali
desa/kelurahan.	
desa/ Keraram	

D. ANALISIS TINGKAT PERKEMBANGAN

1. Laju Perkembangan Tahunan	:	Cepat Berkembang	
		Berkembang	
		Lamban Berkembang	
		Kurang Berkembang	
2. Masalah yang dihadapi	:		
		•••••	
	• • • •	••••••	
	• • • •	•••••	
	• • • •	•••••	
	••••	•••••	
.,	••••	•••••	
	••••	•••••	

	••••		
3. Indikasi Program Tahun Depan	<u> </u> :		
	• • • •		
	• • • •		
	• • • •		
	• • • •		
	••••	••••••	
	• • • •	•••••	
	••••	••••••	
	••••	•••••	
	••••	***************************************	
	••••	••••••	
	• • • •		
	• • • •		
	••••		
••••••••••			
	••••	••••••	
	••••	***************************************	
	••••	••••••	
	••••		
	••••		
	• • • •		

4. Klasifikasi Tingkat Perkembangan	:	SWADAYA
Desa/Kelurahan Selama 5 Tahun		SWAKARYA
		SWASEMBADA
5. Kategori Tingkat Perkembangan	:	SWADAYA MULA
Desa/Kelurahan Selama 5 Tahun		SWADAYA MADYA
		SWADAYA LANJUT
	:	SWAKARYA MULA
		SWAKARYA MADYA
		SWAKARYA LANJUT
	1:	SWASEMBADA MULA
·		SWASEMBADA MADYA
		SWASEMBADA LANJUT

EN DALMENTERI DALAM NEGERI

PLIK INDOMOH. MA'RUF, SE.

4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan

Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan	Ada/tidak-
desa dan peraturan kepala desa	l kali
Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata	Ada/tidak-
pemerintahan desa dan kelurahan	kali
r asimus	Ada/tidak-
pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan	Ada/tidak-
otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan	kali
kepada desa	
Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan	Ada/ tida k-
perundang-undangan	kali
Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data	Ada/tidak-
profil desa dan kelurahan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas,	Ada/tidak-
wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa,	kali
BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan	
Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan	Ada/tidak-
ketenteraman dan ketertiban umum	kali
Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas	Ada/ti dak-
pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga	kali
kemasyarakatan desa dan kelurahan	
Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat	Ada/tidak-
	kali
dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
pemeliharaan sorta pengembangan dan pelestarian	
hasil pembangunan.	. A 1 //: 1 1
Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan	-Ada/tidak-
kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan	Ada/tidak-
kegiatan pemberdayaan masyarakat	kali
Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan	Ada/ tidak-
kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga	_Ada/tidak-
kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan	kali
dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan	
serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan	
keberdayaan masyarakat	Ada/tidak-
1, 11 11 Regiatali lasiitasi Salitasi	kali
pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan	
organisasi anggotanya	Ada/tidak-
Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan	kali
dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan	
desa/kelurahan.	

D. ANALISIS TINGKAT PERKEMBANGAN

Berkembang Lamban Berkembang Kurang Berkembang 2. Masalah yang dihadapi		
Kurang Berkembang		
2. Masalah yang dihadapi		

3. Indikasi Program Tahun Depan :		

3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan

 \tilde{F}

Desa dan Kelurahan	
Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan	Ada/tidak-
Kepala Desa	jenis
Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota	Ada/tidak-
yang diserahkan péngaturannya kepada desa	jenis
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari	Ada/tidak-
kabupaten/kota kepada desa	jenis
Pedoman teknis penyusunan peraturan desa,	Ada/tidak-
1	, 4
peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan	jenis
peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah.	Λ - / - / - / - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Pedoman teknis penyusunan perencanaan	
pembangunan partisipatif serta pengembangan	jenis
lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat	
Transact, transact,	jenis
beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan	
pemerintahan desa/kelurahan	
Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan	Ada/t idak-
untuk desa	jenis
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata	Ada/tidak-
naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	jenis
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang	Ada/tidak-
penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	jenis
berskala kabupaten/kota	.
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai	Ada/tidak-
	jenis
2 2 3 3	
kelurahan harangan dibiayai APRD	Ada/tidak-
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD	nua/ lluar-
kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan	jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang	Ada/tidak-
dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan	jenis
kelurahan	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda	Ada/t idak -
jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa,	jenis
Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD	
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat	Ada/tidak-
hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat	jenis
beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan	
nemerintahan desa/kelurahan	
Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa	A da /tidak-
dan kelurahan	jenis
Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi	Ada/t idak-
desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa	jenis
dan kelurahan	
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai	Ada/tidak-
pemerintahan desa dan kelurahan dalam	jenis
penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan	
lembaga kemasyarakatan	
Pemberian sanksi atas penyimpungan yang dilakukan	Ada/tidak-
kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	kasus
Mengawasi pengelulaan keuangan desa serta	_
anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset	1
pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan	1 .
pemerintanan desa, badan dsana inink desa dan	.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
sumber pendapatan daerah yang dikelela lurah	

IV. POTENSI PRASARANA DAN SARANA

A. PRASARANA DAN SARANA TRANSPORTASI

1. Prasarana Transportasi Darat

1. Prasarana Transportasi Darat	Dail-	D1
Jamia Camana dan Duangana	Baik	Rusak
Jenis Surana dan Prasarana	(km atau	(km atau
1 1 7 1 5	unit)	unit)
1.1. Jalan Desa/Kulurahan		
Panjang jalan aspal		
Panjang jalan makadam		
Panjang jalan tanah		
Panjang jalan sirtu		
Panjang jalan konblok/semen/ beton	3	2.,3
1.2. Jalan antar Desa/Kelurahan/kecamata	an į	
Panjang jalan aspal		
Panjang jalan makadam		
Panjang jalan tanah		
Panjang jalan sirtu		
Panjang jalan konblok/semen/beton		
1.3. Jalan Kabupaten yang melewati Desa/l	Kelurahan	
Panjang jalan aspal	8.Y	2
Panjang jalan makadam		
Panjang jalan tanah		
Panjang jalan sirtu		
Panjang jalan konblok/semen/beton		
1.4. Jalan Provinsi yang melewati Desa/Kel		4
		2
Panjang jalan aspal		Z
Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam	0.1/.0	
Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah		
Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu		
Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton		
Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton 1.5. Panjang Jalan Negara		
Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton 1.5. Panjang Jalan Negara Panjang jalan aspal		
Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton 1.5. Panjang Jalan Negara Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam		
Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton 1.5. Panjang Jalan Negara Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah		
Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton 1.5. Panjang Jalan Negara Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu		
Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton 1.5. Panjang Jalan Negara Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton		
Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton 1.5. Panjang Jalan Negara Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton 1.5. Jembatan Desa/Kelurahan		
Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton 1.5. Panjang Jalan Negara Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton 1.5. Jembatan Desa/Kelurahan Jumlah jembatan beton		
Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton 1.5. Panjang Jalan Negara Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton 1.5. Jembatan Desa/Kelurahan Jumlah jembatan beton Jumlah jembatan besi		
Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton 1.5. Panjang Jalan Negara Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton 1.5. Jembatan Desa/Kelurahan Jumlah jembatan beton Jumlah jembatan besi Jumlah jembatan kayu		
Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton 1.5. Panjang Jalan Negara Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton 1.5. Jembatan Desa/Kelurahan Jumlah jembatan beton Jumlah jembatan besi Jumlah jembatan kayu 1.6. Prasarana Angkutan Darat		
Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton 1.5. Panjang Jalan Negara Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton 1.5. Jembatan Desa/Kelurahan Jumlah jembatan beton Jumlah jembatan besi Jumlah jembatan kayu 1.6. Prasarana Angkutan Darat Jumlah pangkalan ojek		
Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton 1.5. Panjang Jalan Negara Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton 1.5. Jembatan Desa/Kelurahan Jumlah jembatan beton Jumlah jembatan besi Jumlah jembatan kayu 1.6. Prasarana Angkutan Darat Jumlah pangkalan ojek Jumlah stasiun KA		
Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton 1.5. Panjang Jalan Negara Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton 1.5. Jembatan Desa/Kelurahan Jumlah jembatan beton Jumlah jembatan besi Jumlah jembatan kayu 1.6. Prasarana Angkutan Darat Jumlah pangkalan ojek Jumlah stasiun KA Terminal bis/angkutan		
Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton 1.5. Panjang Jalan Negara Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton 1.5. Jembatan Desa/Kelurahan Jumlah jembatan beton Jumlah jembatan besi Jumlah jembatan kayu 1.6. Prasarana Angkutan Darat Jumlah pangkalan ojek Jumlah stasiun KA Terminal bis/angkutan pedesaan/perkotaan		
Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton 1.5. Panjang Jalan Negara Panjang jalan aspal Panjang jalan makadam Panjang jalan tanah Panjang jalan Sirtu Panjang jalan konblok/semen/beton 1.5. Jembatan Desa/Kelurahan Jumlah jembatan beton Jumlah jembatan besi Jumlah jembatan kayu 1.6. Prasarana Angkutan Darat Jumlah pangkalan ojek Jumlah stasiun KA Terminal bis/angkutan		

2. Sarana Transportasi Darat	
Bus umum	Ada/tidakunit
Truck umum	Ada/tidakunit
Angkutan Per-Desa/Kelurahanan	Ada/tidakunit
	Ada/tidakunit
Ojek	Ada/ tidax

Delman/bendi/cidomo	Ada/tidakunit
Becak	Ada/tidakunit
Kereta api	Ada/tidakunit
	Ada/tidakunit
3. Prasarana Transportasi laut/sungai	
Jumlah tambatan perahu	uni
Jumlah pelabuhan kapal penumpang	uni
Jumlah pelabuhan kapal barang	uni
	uni
4. Sarana Transportasi sungai/laut	
Perahu motor	Ada/tidakuni
Kapal antar pulau	Ada/tidakuni
Perahu:tanpa motor	Ada/tidakuni
Jet Boat	Ada/tidakuni
Kapal Pesiar	Ada/tidakuni
	Ada/tidakuni
E Draggerone Transportasi udara	
 Prasarana Transportasi udara Lapangan terbang nasional/internasiona 	all Ada/tidakuni
Lapangan terbang nasional/internasional	Ada/tidakuni
Lapangan terbang perintis	Ada/tidakuni
Lapangan terbang domestik	Ada/tidakuni
Helipad	Ada/tidakuni
Lapangan terbang komersial	mua/ tidakuiii
PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFOR	
1. Telepon Telepon umum	Ada/tidakuni
1. Telepon Telepon umum Wartel	Ada/tidakun
1. Telepon Telepon umum Wartel Warnet	Ada/tidakun Ada/tidakun Ada/tidakun
1. Telepon Telepon umum Wartel Warnet Jumlah Pelanggan Telkom	Ada/tidakun Ada/tidakun Ada/tidakun
1. Telepon Telepon umum Wartel Warnet Jumlah Pelanggan Telkom Jumlah Pelanggan GSM	Ada/tidakun Ada/tidakun Ada/tidakun oran
1. Telepon Telepon umum Wartel Warnet Jumlah Pelanggan Telkom Jumlah Pelanggan GSM Jumlah Pelanggan CDMA	Ada/tidakun Ada/tidakun Ada/tidakun oran
1. Telepon Telepon umum Wartel Warnet Jumlah Pelanggan Telkom Jumlah Pelanggan GSM Jumlah Pelanggan CDMA Sinyal Telepon Seluler/Handphone	Ada/tidakun Ada/tidakun Ada/tidakun oran
Telepon umum Wartel Warnet Jumlah Pelanggan Telkom Jumlah Pelanggan GSM Jumlah Pelanggan CDMA Sinyal Telepon Seluler/Handphone	Ada/tidakun: Ada/tidakun: Ada/tidakoranoran Ada/tidak Ada/tidak
1. Telepon Telepon umum Wartel Warnet Jumlah Pelanggan Telkom Jumlah Pelanggan GSM Jumlah Pelanggan CDMA Sinyal Telepon Seluler/Handphone 2. Kantor Pos Kantor pos	Ada/tidak
Telepon umum Wartel Warnet Jumlah Pelanggan Telkom Jumlah Pelanggan GSM Jumlah Pelanggan CDMA Sinyal Telepon Seluler/Handphone 2. Kantor Pos Kantor pos Kantor pos pernbantu	Ada/tidak
1. Telepon Telepon umum Wartel Warnet Jumlah Pelanggan Telkom Jumlah Pelanggan GSM Jumlah Pelanggan CDMA Sinyal Telepon Seluler/Handphone 2. Kantor Pos Kantor pos	Ada/tidak
Telepon umum Wartel Warnet Jumlah Pelanggan Telkom Jumlah Pelanggan GSM Jumlah Pelanggan CDMA Sinyal Telepon Seluler/Handphone 2. Kantor Pos Kantor pos Kantor pos pernbantu Tukang pos 3. Radio/TV	Ada/tidak
Telepon umum Wartel Warnet Jumlah Pelanggan Telkom Jumlah Pelanggan GSM Jumlah Pelanggan CDMA Sinyal Telepon Seluler/Handphone 2. Kantor Pos Kantor pos Kantor pos pernbantu Tukang pos 3. Radio/TV TV umum	Ada/tidak
Telepon umum Wartel Warnet Jumlah Pelanggan Telkom Jumlah Pelanggan GSM Jumlah Pelanggan CDMA Sinyal Telepon Seluler/Handphone 2. Kantor Pos Kantor pos Kantor pos pernbantu Tukang pos 3. Radio/TV TV umum Jumlah radio	Ada/tidak
Telepon umum Wartel Warnet Jumlah Pelanggan Telkom Jumlah Pelanggan GSM Jumlah Pelanggan CDMA Sinyal Telepon Seluler/Handphone 2. Kantor Pos Kantor pos Kantor pos pernbantu Tukang pos 3. Radio/TV TV umum Jumlah radio Jumlah TV	Ada/tidak
Telepon umum Wartel Warnet Jumlah Pelanggan Telkom Jumlah Pelanggan GSM Jumlah Pelanggan CDMA Sinyal Telepon Seluler/Handphone 2. Kantor Pos Kantor pos Kantor pos pernbantu Tukang pos 3. Radio/TV TV umum Jumlah radio	Ada/tidak
Telepon umum Wartel Warnet Jumlah Pelanggan Telkom Jumlah Pelanggan GSM Jumlah Pelanggan CDMA Sinyal Telepon Seluler/Handphone 2. Kantor Pos Kantor pos Kantor pos pernbantu Tukang pos 3. Radio/TV TV umum Jumlah radio Jumlah TV Jumlah parabola	Ada/tidak
Telepon umum Wartel Warnet Jumlah Pelanggan Telkom Jumlah Pelanggan GSM Jumlah Pelanggan CDMA Sinyal Telepon Seluler/Handphone 2. Kantor Pos Kantor pos Kantor pos pernbantu Tukang pos 3. Radio/TV TV umum Jumlah radio Jumlah TV Jumlah parabola 4. Koran/majalah/buletin	Ada/tidak
Telepon umum Wartel Warnet Jumlah Pelanggan Telkom Jumlah Pelanggan GSM Jumlah Pelanggan CDMA Sinyal Telepon Seluler/Handphone 2. Kantor Pos Kantor pos Kantor pos pernbantu Tukang pos 3. Radio/TV TV umum Jumlah radio Jumlah TV Jumlah parabola 4. Koran/majalah/buletin Koran/surat kabar	Ada/tidak
Telepon umum Wartel Warnet Jumlah Pelanggan Telkom Jumlah Pelanggan GSM Jumlah Pelanggan CDMA Sinyal Telepon Seluler/Handphone 2. Kantor Pos Kantor pos Kantor pos pernbantu Tukang pos 3. Radio/TV TV umum Jumlah radio Jumlah TV Jumlah parabola 4. Koran/majalah/buletin Koran/surat kabar Majalah	Ada/tidak
Telepon umum Wartel Warnet Jumlah Pelanggan Telkom Jumlah Pelanggan GSM Jumlah Pelanggan CDMA Sinyal Telepon Seluler/Handphone 2. Kantor Pos Kantor pos Kantor pos pernbantu Tukang pos 3. Radio/TV TV umum Jumlah radio Jumlah TV Jumlah parabola 4. Koran/majalah/buletin Koran/surat kabar Majalah Papan iklan/reklame	Ada/tidak
Telepon umum Wartel Warnet Jumlah Pelanggan Telkom Jumlah Pelanggan GSM Jumlah Pelanggan CDMA Sinyal Telepon Seluler/Handphone 2. Kantor Pos Kantor pos Kantor pos pernbantu Tukang pos 3. Radio/TV TV umum Jumlah radio Jumlah TV Jumlah parabola 4. Koran/majalah/buletin Koran/surat kabar Majalah Papan iklan/reklame Papan pengumuman	Ada/tidak
Telepon umum Wartel Warnet Jumlah Pelanggan Telkom Jumlah Pelanggan GSM Jumlah Pelanggan CDMA Sinyal Telepon Seluler/Handphone 2. Kantor Pos Kantor pos Kantor pos pernbantu Tukang pos 3. Radio/TV TV umum Jumlah radio Jumlah TV Jumlah parabola 4. Koran/majalah/buletin Koran/surat kabar Majalah Papan iklan/reklame Papan pengumuman 2. PRASARANA AIR BERSIH DAN SANIT	Ada/tidak
Telepon umum Wartel Warnet Jumlah Pelanggan Telkom Jumlah Pelanggan GSM Jumlah Pelanggan CDMA Sinyal Telepon Seluler/Handphone 2. Kantor Pos Kantor pos Kantor pos pernbantu Tukang pos 3. Radio/TV TV umum Jumlah radio Jumlah TV Jumlah parabola 4. Koran/majalah/buletin Koran/surat kabar Majalah Papan iklan/reklame Papan pengumuman 2. PRASARANA AIR BERSIH DAN SANIT 1. Prasarana air bersih	Ada/tidak
Telepon umum Wartel Warnet Jumlah Pelanggan Telkom Jumlah Pelanggan GSM Jumlah Pelanggan CDMA Sinyal Telepon Seluler/Handphone 2. Kantor Pos Kantor pos Kantor pos pernbantu Tukang pos 3. Radio/TV TV umum Jumlah radio Jumlah TV Jumlah parabola 4. Koran/majalah/buletin Koran/surat kabar Majalah Papan iklan/reklame Papan pengumuman 2. PRASARANA AIR BERSIH DAN SANIT	Ada/tidak

Jumlah hidran umum	unit
Jumlah PAH	unit
Jumlah tangki air bersih	unit
Jumlah embung	unit
Jumlah mata air	
Jumlah bangunan pengolahan air	unit
Bersih/air minum	

2. Sanitasi

Saluran drainase/saluran	6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
pembuangan air limbah	A'da/tidak
Sumur resapan air rumah tangga	rumah
Jumlah MCK Umum	Unit
Pemilik jumlah jamban keluarga	KK
Kondisi saluran drainase/saluran	Baik Unit /rusak unit
pembuangan air limbah	Unit/mampetUnit/
	kurang memadai Unit

D. PRASARANA DAN KONDISI IRIGASI

1. Prasarana Irigasi

2. Kondisi	
Odililan pinta posta o	
Jumlah pintu pembagi air	unit
Jumlah pintu sadap	unit
Panjang saluran tersier	m
Panjang saluran sekunder	m
Panjang saluran primer	m !

m ,
m
m
unit
unit

E. PRASARANA DAN SARANA PEMERINTAHAN

a. Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa/Kelurahan

	Ada/tidak
Gedung Kantor	
Kondisi	Baik/Rusak
Jumlah ruang kerja	Ruang
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya	Ada/tidak,
Listrik	Ada/tidak
Air bersih	Ada/tidak
Telepon	Ada/tidak
Rumah Dinas Kepala Desa/Lurah	Ada/tidak
Rumah dinas perangkat desa/kelurahan	ada/tidak
Inventaris dan alat tulis kantor	
Jumlah mesin tik	buah
Jumlah meja	buah
Jumlah kursi	buah
Jumlah almari arsip	buah
Komputer	únit
Mesin fax	unit
Kendaraan dinas	unit

Administrasi Pemerintahan Desa/Kel	
Buku Data Peraturan Desa	Ada/tidak, terisi/tidak
Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah	Ada/tidak, terisi/tidak
Buku administrasi kependudukan	Ada/tidak, terisi/tidak
Buku data inventaris	Ada/tidak, terisi/tidak
Buku data aparat	Ada/tidak, terisi/tidak
Buku data tanah milik desa/tanah	
kas desa/milik keturahan	Ada/tidak, terisi/tidak
Buku administrasi pajak dan retribusi	Ada/tidak, terisi/tidak
Buku data tanah	Ada/tidak, terisi/tidak
Buku laporan pengaduan masyarakat	Ada/tidak, terisi/tidak
Buku agenda ekspedisi	Ada/tidak, terisi/tidak
Buku profil desa/kelurahan	Ada/tidak, Terisi/tidak
Buku data induk penduduk	Ada/tidak, terisi/tidak
Buku buku data mutasi penduduk	Ada/tidak, terisi/tidak
Buku rekapitulasi jumlah penduduk	Ada/tidak, terisi/tidak
akhir bulan	
Buku registrasi pelayanan penduduk	Ada/tidak, terisi/tidak
Buku data penduduk sementara	Ada/tidak, terisi/tidak
Buku anggaran penerimaan	Ada/tidak, terisi/tidak
Buku anggaran pengeluaran pegawai	
dan pembangunan	Ada/tidak, terisi/tidak
Buku kas umum	Ada/tidak, terisi/tidak
Buku kas pembantu penerimaan	Ada/tidak, terisi/tidak
Buku kas pembantu pengeluaran	
rutin dan pembangunan	Ada/tidak, terisi/tidak
Buku data lembaga kemasyarakatan	Ada/tidak, terisi/tidak

2. Prasarana dan Sarana Badan Permusyawaratan Desa/BPD

Ada/tidak
Ada/tidak
Ada/Tidak
Baik,/rusak
Ada/tidak
Ada/tidak
Ada/tidak
buah
buah
buah
buah
unit
unit
Ada/tidak
Jenis
Ada/tidak
Ada/tidak

3. Prasarana dan Sarana Dusun/Lingkungan atau Sebutan Lain

Gedung kantor atau Balai Pertemuan	Ada/tidak
Alat tulis kantor	Ada/tidak
Barang inventaris	Ada/tidak
Buku administrasi	jenis
	Terisi/tidak
Jenis kegiatan	jenis
Jumlah pengurus	orang

F. PRASARANA DAN SARANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

Gedung/kantor Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK	Ada/tidak
Peralatan Kantor: komputer, fax	Ada/tidak
Mesin tik	Ada/tidak
Kardek	Ada/tidak
Buku administrasi lembaga kemasyarakatan	jenis
Jumlah meja dan kursi	unit
LKMD/LPM atau sebutan lain	
Memiliki kantor sendiri	Ada/tidak
Peralatan Kantor: komputer, fax	Ada/tidak
Mesin tik,	Ada/tidak
Kardek	Ada/tidak
Buku administrasi lembaga kemasyarakatan	jenis
Jumlah meja dan kursi	unit
Buku administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	Jenis
PKK	Ada/tidak
Gedung/kantor	Ada/tidak
Peralatan kantor/ATK/inventaris	Ada/tidak
Kepengurusan	Ada/tidak
	Aktif/tidak
Buku administrasi PKK	. Ada/tidak
	Jika ada,
	jenis
Kegiatan	Ada/tidak
Jumlah kegiatan	jenis
Karang Taruna	Ada/tidak
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku administrasi	▼
Jumlah kegiatan	Jenis
RT	Ada/tidak
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku administrasi	Jenis

Jumlah kegiatan	T ' -
o diman kegiatan	Jenis
RW	Ada/tidak
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku administrasi	Jenis
Jumlah Kegiatan	Jenis
ouman Regiatan	
Lembaga adat	
Memiliki kantor/gedung/menumpang	Ada / tidak
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku Administrasi	Jenis
Jumlah Kegiatan	Jenis
Outman Regiatan	
BUMDES	Ada/tidak
Memiliki kantor/gedung/menumpang	
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku Administrasi	Jenis
Jumlah Kegiatan	Jenis
O dillian regiatari	
Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan	
Masyarakat	Ada/tidak
Kantor/gedung/menumpang	Ada/tidak
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku administrasi	
Jumlah kegiatan	Jenis
	Jenis
Kantor/gedung Organisasi Sosial	Ada/tidak
Kemasyarakatan lainnya	
	Ada/tidak
	Aktif/tidak
Kantor/gedung Organisasi Profesi yang ada	
	Ada/tidak
	Aktif/tidak

G. PRASARANA PERIBADATAN

Jumlah Masjid	2 buah
Jumlah Langgar/Surau/Mushola	1 buah
Jumlah Gereja Kristen Protestan	buah
	buah
Jumlah Gereja Katholik	buah
Jumlah Wihara	buah
Jumlah Pura	
Jumlah Klenteng	buah

H. PRASARANA OLAH RAGA

	I have be
Lapangan sepak bola	1 buah
	2 buah
Lapangan bulu tangkis	
Meja pingpong	buah
I WICIA DITIEDOTIE	

Lapangan tenis	buah
Lapangan voli	2 buah
Lapangan golf	<u>.</u> buah
Pacuan kuda	buah
Arum jeram	A da /tidak
Lapangan basket	buah
Pusat kebugaran	buah
Gelanggang Remaja	Ada/tidak

I. PRASARANA DAN SARANA KESEHATAN

1. Prasarana Kesehatan

Rumah sakit umum	unit unit
Puskesmas	a unit
Puskesmas pembantu	1 unit
Poliklinik/balai pengobatan	unit
Apotik	1 unit
Posyandu	unit
Toko obat	unit
Balai pengobatan masyarakat yayasan/swasta	<u></u> unit
Gudang menyimpan obat	unit
Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter	unit
Rumah Bersalin	<u></u> unit
Balai Kesehatan Ibu dan Anak	unit
Rumah Sakit Mata	unit

2. Sarana Kesehatan

Jumlah dokter umum	orang
Jumlah dokter gigi	orang
Jumlah dokter spesialis lainnya	orang
Jumlah paramedis	orang
Jumlah dukun bersalin terlatih	orang
Bidan	2 orang
Perawat	orang
Dukun pengobatan alternatif	orang
Jumlah dokter praktek	orang
Laboratorium kesehatan	
	•••••

J. PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN

1	::::: hunch
	milik sendiri buah
Sewa buah	milik sendiri buah
	milik sendiri_ buah
Sewa buah	milik sendiri.1. buah
Sewa buah	milik sendiri.1. buah
	milik sendiri.i. buah
Sewabuah	milik sendiri.i. buah
Sewa - buah	milik sendiri buah
	milik sendiri.1. buah`
Sewa buan	milik sendiri.i. buan
	Sewa buah Sewa buah Sewa buah Sewa buah

Jumlah perpustakaan		
keliling	Sewa buah	milik sendiri buah
Perpustakaan		
desa/kelurahan	Sewa buah	milik sendiri buah
Taman bacaan	Sewa buah	milik sendiri buah
	Sewa buah	milik sendiri buah
	Sewa buah	milik sendiri buah

K. PRASARANA ENERGI DAN PENERANGAN

Listrik PLN	unit
Diesel umum	unit
Genset pribadi	unit
Lampu minyak tanah/jarak/kelapa	Keluarga
Kayu bakar	Keluarga
Batu bara	Keluarga
Tanpa penerangan	Keluarga

L. PRASARANA HIBURAN DAN WISATA

Jumlah Tempat Wisata	buah
Hotel bintang 5	buah
Hotel bintang 4	buah
Hotel bintang 3	buah
Hotel bintang 2	buah
Hotel bintang 1	buah
Hotel melati	buah
Diskotik	buah
Bilyar	buah
Karaoke	buah
Museum	buah
Restoran	buah
Bioskop	buah
	buah

M. PRASARANA DAN SARANA KEBERSIHAN

Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	Lokasi
Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Lokasi
Alat penghancur sampah//incinerator	Ada/tidak
Jumlah gerobak sampah	
Jumlah tong sampah	Unit
Jumlah truck pengangkut sampah	Unit
Jumlah Satgas Kebersihan	Kelompok
Jumlah anggota Satgas Kebersihan	Orang
Jumlah pemulung	Orang
Tempat pengelolaan sampah	Ada/tidak
Tempar pongorosa	·
Pengelolaan sampah lingkungan/RT	Pemerintah/Swasta /Swadaya
Pengelola sampah lainnya	Ada/tidak

B. ANALISIS POTENSI DESA/KELURAHAN

B.1. TINGKATAN POTENSI

1. Potensi Umum	:	TINGGI/SEDANG/RENDAH
2. Potensi Sumber Daya Alam	:	TINGGI/SEDANG/RENDAH
3. Potensi Sumber Daya Manusia	:	TINGGI/SEDANG/RENDAH
4. Potensi Kelembagaan	:	TINGGI/SEDANG/RENDAH
5. Potensi Prasarana dan Sarana	:	TINGGI/SEDANG/RENDAH

B.2. POTENSI PENGEMBANGAN

1) Potensi tanaman pangan	:	Sangat potensial/Potensial Cukup/Kurang Potensial
Y 1 1	<u> </u>	Cukup/ Kurang rotensiai
Kendala		
·		
		O
2) Potensi tanaman apotik hidup	<u>:</u>	Sangat potensial/Potensial
		Cukup/Kurang Potensial

Kendala	•	
3) Potensi perkebunan	:	Sangat potensial/Potensial
		Cukup/Kurang Potensial
Kendala	:	

4) Potensi kehutanan		Sangat potensial/Potensial
4) Potensi kenutanan		Cukup/Kurang Potensial
 Kendala	:	
5) Determined and		Sangat potensial/Potensial
5) Potensi peternakan		Cukup/Kurang Potensial
Kendala		
Kendala		
;		
		Sangat potensial/Potensial
6) Potensi perikanan		Cukup/Kurang Potensial
		Cukup/ Italang 1 ottom
Kendala	:	

7) Potensi pertambangan	:	Sangat potensial/Potensial
		Cukup/Kurang Potensial
Kendala	:	***************************************

8) Potensi jasa dan perdagangan	:	Sangat potensial/Potensial
O) Poterisi jasa dati perangangan		Cukup/Kurang Potensial
Kendala	:	

·	·	
9) Potensi industri		: Sangat potensial/Potensial
		Cukup/Kurang Potensial
Kendala		1
	:	
10) Potensi Wisata		Sangat potensial/Potensial
,		Cukup/Kurang Potensial
Kendala		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	•	
11) Potensi persawahan		: Sangat potensial/Potensial Cukup/Kurang Potensial
Kendala		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
12) Potensi Komditi Buah-		: Sangat potensial/Potensial
buahan		Cukup/Kurang Potensial
Kendala		

B.3. TIPOLOGI DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan Persawahan	: 1	ndikator Unggulan:
		.,,

	<u> </u>	
Desa/Kelurahan Perladangan	:	Indikator Unggulan:
		••••••••••
		•••••
	:	***************************************
Desa/Kelurahan Perkebunan	;	Indikator Unggulan:

	<u>:</u>	*************************************
Desa/Kelurahan Peternakan	:	Indikator Unggulan:
Desa/Reidianan i etermana		***************************************
	:	***************************************

Desa/Kelurahan Nelayan	:	Indikator Unggulan:
Desay Heraranan		
	: :	

Desa/Kelurahan Pertambangan	:	Indikator Unggulan:
	<u>:</u>	
Desa/Kelurahan Kerajinan Industri Kecil	:	Indikator Unggulan:
1		
	:	
Desa/Kelurahan Industri Sedang dan Besar	:	Indikator Unggulan:
	:	
Desa/Kelurahan Jasa dan Perdagangan	:	Indikator Unggulan:
had bd		
Desa/Kelurahan Pariwisata	:	Indikator Unggulan:

DATA TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Jumlah Penduduk

Jumlah	Jenis Kelamin		
Juman	Laki-laki	Perempuan	
Jumlah penduduk tahun ini	969orang	8.29 orang	
Jumlah penduduk tahun lalu	8.29orang	9.3.1 orang	
Persentase perkembangan	%	%	

B. Jumlah Keluarga

Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
	Laki-iaki	relempuan	Totai
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	450 кк	3.Qкк	. 4.8.c KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	4.4.2KK	31кк	
Persentase Perkembangan	%	%	%

II. EKONOMI MASYARAKAT

A. Pengangguran

1.	Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	80.1 orang
2.	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	4.4.Corang
3.	Junilah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	2 <i>8</i> .3orang
4.	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	YY. orang
5.	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	28 orang
6.	Jumlah per duduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	Y orang
7.	Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	2 orang

B. Kesejahteraan Keluarga

uarga	kelua	Jumlah keluarga prasejahtera	
	kelua	Jumlah keluarga sejahtera 1	
	kelua	Jumlah keluarga sejahtera 2	
uarga	kelua		
luarga			
luarga	kelua		
lı	kelu	Jumlah keluarga sejahtera 3 Jumlah keluarga sejahtera 3 plus Total jumlah kepala keluarga	4 5

III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO

A. SUBSEKTOR PERTANIAN	
A. I. Tanaman Padi dan Palawija	
1. Luas tanaman padi tahun ini	95.5 ha
2. Nilai produksi tahun ini	Rp
3. Biaya pemupukan	Rp
4. Biaya bibit	Rp

11	·
5. Biaya obat	Rp
б. Biaya lainnya	
A.2. Tanaman Jagung	
1. Luas tanaman tahun ini	ha
2. Nilai produksi tahun ini	Rp
3. Biaya pemupukan	Rp
4. Biaya bibit	Rp
5. Biaya obat	Rp
6. Biaya lainnya	
A.3. Tanaman Kedelai	ha
1. Luas tanaman tahun ini	Rp
2. Nilai produksi tahun ini	Rp
3. Biaya pemupukan	Rp
4. Biaya bibit	Rp
5. Biaya obat	Rp
6. Biaya lainnya	
A.4. Tanaman Bawang Putih	ho
1. Luas tanaman tahun ini	ha
2. Nilai produksi tahun ini	Rp
3. Biaya pemupukan	Rp
4. Biaya bibit	Rp
5. Biaya obat	Rp
6. Biaya lainnya	
A.5. Tanaman Bawang Merah	ho
1. Luas tanaman tahun ini	ha
2. Nilai produksi tahun ini	Rp
3. Biaya pemupukan	Rp
4. Biaya bibit	Rp
5. Biaya obat	Rp
6. Biaya lainnya	
A.6. Tanaman Ubi-ubian	
1. Luas tanaman tahun ini	ha
2. Nilai produksi tahun ini	Rp
3. Biaya pemupukan	Rp
4. Biaya bibit	Rp
5. Biaya obat	Rp
6. Biaya lainnya	
A.7. Tanaman Buah-buahan	
1. Luas tanaman tahun ini	ha
2. Nilai produksi tahun ini	Rp
3. Biaya pemupukan	Rp
4. Biaya bibit	Rp
5. Biaya obat	Rp
6. Biaya lainnya	
A.8. Tanaman Sayur-sayuran	ha
Luas tanaman tahun ini Nilai produksi tahun ini	Rp
3. Biaya pemupukan	Rp
O. Diaya poilaparte	

A Diago hibit	Pn	
4. Biaya bibit	Rp	
5. Biaya obat	Rp	
6. Biaya lainnya		
A.9. Tanaman	- ho	
1. Luas tanaman tahun ini	ha	
2. Nilai produksi tahun ini	Rp	
3. Biaya pemupukan	Rp	
4. Biaya bibit	Rp	
5. Biaya obat	Rp	
6. Biaya lainnya		
A.10. Tanaman		
1. Luas tanaman tahun ini	ha	
2. Nilai produksi tahun ini	Rp	
3. Biaya pemupukan	Rp	
4. Biaya bibit	Rp	
	Rp	
5. Biaya obat		
6. Biaya lainnya		
B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN		
B.1. Kelapa Sawit		
1. Luas tanaman tahun ini	ha	
2. Nilai produksi tahun ini	Rp	
3. Biaya pemupukan	Rp	
4. Biaya bibit	Rp	
5. Biaya obat	Rp	
6. Binya lainnya		
B.2. Kelapa		
1. Luas tanaman tahun ini	600 ha	
2. Nilai produksi tahun ini	Rp	
3. Biaya pemupukan	Rp	
4. Biaya bibit	Rp	
5. Biaya obat	Rp	
6. Biaya lainnya		
B.3. Kopi	ha	
1. Luas tanaman tahun ini	Rp	
2. Nilai produksi tahun ini	Rp	
3. Biaya pemupukan	Rp	
4. Biaya bibit	Rp	
5. Biaya obat		
6. Biaya lainnya		
B.4. Coklat		
1. Luas tanaman tahun ini	ha	
2. Nilai produksi tahun ini	Rp	
2. Pierra pemunukan	Rp	
3. Biaya pemupukan	Rp	
4. Biaya bibit	Rp	
5. Biaya obat		
6. Biaya lainnya	· .	
B.5. Cengkeh		
1. Luas tanaman tahun ini	ha	
2. Nilai produksi tahun ini	Rp	
3. Biaya pemupukan	Rp	

A Diana bibis	I Dn
4. Biaya bibit	Rp
5. Biaya obat	Rp
6. Biaya lainnya	
B.6. Tembakau	h a
1. Luas tanaman tahun ini	ha
2. Nilai produksi tahun ini	Rp
3. Biaya pemupukan	Rp
4. Biaya bibit	Rp
5. Biaya obat	Rp
6. Biaya lainnya	
B.7. Teh	1
1. Luas tanaman tahun ini	ha
2. Nilai produksi tahun ini	Rp
3. Biaya pemupukan	Rp
4. Biaya bibit	Rp
5. Biaya obat	Rp
6. Biaya lainnya	
	· ·
B.8. Kemiri	
1. Luas tanaman tahun ini	ha
2. Nilai produksi tahun ini	Rp
3. Biaya pemupukan	Rp
4. Biaya bibit	Rp
5. Biaya obat	Rp
6. Biaya lainnya	
B.9. Janibu Mete	
1. Luas tanaman tahun ini	ha
2. Nilai produksi tahun ini	Rp
3. Biaya pemupukan	Rp
4. Biaya bibit	Rp
5. Biaya obat	Rp
6. Biaya lainnya	
B.10. Kapas	
1. Luas tanaman tahun ini	ha
2. Nilai produksi tahun ini	Rp
3. Biaya pemupukan	Rp
4. Biaya bibit	Rp
5. Biaya obat	Rp
6. Biaya lainnya	
B.11. Karet	ha
1. Luas tanaman tahun ini	Rp ha
2. Nilai produksi tahun ini	Rp
3. Biaya pemupukan	Rp
4. Biaya bibit	Rp
5. Biaya obat	
6. Biaya lainnya	
D 10 1711	
B.12. Vanili	1
	ha
Luas tanaman tahun ini Nilai produksi tahun ini	ha

3. Biaya pemupukan	Rp
4. Biaya bibit	Rp
5. Biaya obat	Rp
6. Biaya lainnya	
B.13. Pala	
1. Luas tanaman tahun ini	ha
2. Nilai produksi tahun ini	Rp
3. Biaya pemupukan	Rp
4. Biaya bibit	Rp
5. Biaya obat	Rp
6. Biaya lainnya	
B.14. Jarak Pagar	
1. Luas tanaman tahun ini	ha
Nilai produksi tahun ini	Rp
3. Biaya pemupukan	Rp
4. Biaya bibit	Rp
5. Biaya obat	Rp
6. Biaya lainnya	
B.15. Jarak Kepyar	ha
 Luas tanaman tahun ini Nilai produksi tahun ini 	Rp
3. Biaya pemupul:an	Rp
	Rp
4. Biaya bibit	Rp
5. Biaya obat	
6. Biaya lainnya	
B.16	
1. Luas tanaman tahun ini	ha
2. Nilai produksi tahun ini	Rp
3. Biaya pemupukan	Rp
4. Biaya bibit	Rp
5. Biaya obat	Rp
6. Biaya lainnya	
D 17	
B.17	ha
1. Luas tanaman tahun ini 2. Nilai produksi tahun ini	Rp
3. Biaya pemupukan	Rp
4. Biaya bibit	Rp
5. Biaya obat	Rp
6. Biaya lainnya	
B.18	ho
1. Luas tanaman tahun ini	ha
2. Nilai produksi tahun ini	Rp
3. Biaya pemupukan	Rp
4. Biaya bibit	Rp
5. Biaya obat 6. Biaya lainnya	
C. SUBSEKTOR PETERNAKAN	Rp
Total nilai produksi tahun ini	

/.

Total nilai bahan baku yang digunakan	
	Rp
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp
Jumlah total ternak tahun ini	ekor
D. SUBSEKTOR PERIKANAN	
Total nilai produksi	Rp
Total nilai bahan baku yang digunakan	RP
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp
Total biaya antara yang dihabiskan	RPjenis
Total jumlah jenis usaha perikanan	jenis
E. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN	
Total nilai produksi tahun ini	Rp
Total nilai bahan baku yang digunakan	RP
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp
Total biaya antara yang dihabiskan	
Jumlah total jenis bahan tambang dan galian	jenis
yang ada	
D SUBSEUTOD MEDA HNAN	
F. SUBSEKTOR KERAJINAN	Pn
Total nilai produksi	Rp
Total nilai bahan baku yang digunakan	
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp
Total biaya antara yang dihabiskan	Rpjenis
Total jenis kerajinan rumah tangga	jenis
G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN	
G.1. Subsektor Industri Pakaian	
Total nilai produksi	Rp
Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp
Total nilai bahan penolong yang digunakan	
Total lilial ballali periotoria juria diadultaria	Rp
Total biaya antara yang dihabiskan	Rp
Total biaya antara yang dihabiskan	Rp
Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri yang ada	
Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri yang ada G.2. Subsektor Industri Pangan Total nilai produksi	
Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri yang ada G.2. Subsektor Industri Pangan Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan	jenis
Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri yang ada G.2. Subsektor Industri Pangan Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan	jenis Rp
Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri yang ada G.2. Subsektor Industri Pangan Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp
Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri yang ada G.2. Subsektor Industri Pangan Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total biaya antara yang dihabiskan	Rp
Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri yang ada G.2. Subsektor Industri Pangan Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri pangan	Rp
Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri yang ada G.2. Subsektor Industri Pangan Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri pangan G.3. Industri Pengolahan Migas	Rp
Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri yang ada G.2. Subsektor Industri Pangan Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri pangan G.3. Industri Pengolahan Migas Total nilai produksi	Rp
Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri yang ada G.2. Subsektor Industri Pangan Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri pangan G.3. Industri Pengolahan Migas Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp
Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri yang ada G.2. Subsektor Industri Pangan Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri pangan G.3. Industri Pengolahan Migas Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rpjenis Rp Rp Rp Rp Rp Rp Ap Indicate the second secon
Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri yang ada G.2. Subsektor Industri Pangan Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri pangan G.3. Industri Pengolahan Migas Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rpjenis Rp Rp Rp Rp Rp Rp Ap Indicate the second secon
Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri yang ada G.2. Subsektor Industri Pangan Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri pangan G.3. Industri Pengolahan Migas Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri minyak & gas	Rpjenis Rp Rp Rp Rp Rp Rp Ap Indicate the second secon
Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri yang ada G.2. Subsektor Industri Pangan Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri pangan G.3. Industri Pengolahan Migas Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri minyak & gas G.4. Industri Pengolahan Non Migas	Rpjenis Rp
Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri yang ada G.2. Subsektor Industri Pangan Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri pangan G.3. Industri Pengolahan Migas Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri minyak & gas G.4. Industri Pengolahan Non Migas Total nilai produksi	Rpjenis Rp
Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri yang ada G.2. Subsektor Industri Pangan Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri pangan G.3. Industri Pengolahan Migas Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri minyak & gas G.4. Industri Pengolahan Non Migas Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan	Rpjenis Rp
Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri yang ada G.2. Subsektor Industri Pangan Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri pangan G.3. Industri Pengolahan Migas Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total biaya antara yang dihabiskan Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri minyak & gas G.4. Industri Pengolahan Non Migas Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan baku yang digunakan	Rpjenis Rpjenis Rpjenis Rpjenis Rp
Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri yang ada G.2. Subsektor Industri Pangan Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri pangan G.3. Industri Pengolahan Migas Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri minyak & gas G.4. Industri Pengolahan Non Migas Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rpjenis Rpjenis Rpjenis Rpjenis Rp
Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri yang ada G.2. Subsektor Industri Pangan Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri pangan G.3. Industri Pengolahan Migas Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri minyak & gas G.4. Industri Pengolahan Non Migas Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri non migas	Rpjenis Rpjenis Rpjenis Rpjenis Rp
Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri yang ada G.2. Subsektor Industri Pangan Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri pangan G.3. Industri Pengolahan Migas Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri minyak & gas G.4. Industri Pengolahan Non Migas Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total jumlah jenis industri non migas G.6. INDUSTRI	Rpjenis Rpjenis Rpjenis Rpjenis Rp
Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri yang ada G.2. Subsektor Industri Pangan Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri pangan G.3. Industri Pengolahan Migas Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri minyak & gas G.4. Industri Pengolahan Non Migas Total nilai produksi Total nilai produksi Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan baku yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total nilai bahan penolong yang digunakan Total biaya antara yang dihabiskan Total jumlah jenis industri non migas	Rpjenis Rpjenis Rpjenis Rpjenis Rp

Total biaya antara yang dihabiskan	
Total jumlah jenis industri	jenis
THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	
H. SUBSEKTOR KEHUTANAN	Dn
Total nilai produksi	Rp
Total nilai bahan baku yang digunakan	Rp
Total nilai bahan penolong yang digunakan	Rp
Total biaya antara yang dihabiskan	Rp
	Rp
I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN	
RESTORAN	
I.1. Subsektor Perdagangan Besar	Dis
Total nilai transaksi	Rp
Total nilai aset perdagangan yang ada	Rp
Total jumlah jenis perdagangan besar	Rp
Total nilai biaya yang dikeluarkan	Rp
Total biaya antara lainnya	Rp
I.2. Subsektor Perdagangan Eceran	
Jumlah total jenis perdagangan eceran	jenis
Total nilai transaksi	Rp
Total nilai biaya yang dikeluarkan	Rp
Total nilai aset perdagangan eceran	Rp
I.3. Subsektor Hotel	
Jumlah total penginapan dan penyediaan	unit
akomodasi yang ada	
Jumlah Yotal Pendapatan	Rp
Jumlah total biaya pemeliharaan	Rp
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan	Rp
Jumlah total pendapatan yang diperoleh	Rp
I.4. Subsektor Restoran	
1.4. Stibsektor Restoran	unit
Jumlah tempat penyediaan konsumsi	Rp
Biaya konsumsi yang dikeluarkan	Rp
Biaya antara lainnya	Rp
Jumlah total pendapatan yang diperoleh	TCp.
J. Sektor Bangunan/Konstruksi	unit
Jumlah bangunan yang ada tahun ini	unit
Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan	Rp
Total nilai bangunan yang ada	Rp
Biaya antara lainnya	Rp
K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa	
Perusahaan	
K.1. Subsektor Bank	D.
Jumlah transaksi perbankan	Rp
Jumlah nilai transaksi perbankan	Rp
Jumlah biaya yang dikeluarkan	Rp
K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank	
Jumlah lembaga keuangan bukan bank	unit
Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga	jenis
keuangan bukan bank	

Biaya yang dikeluarkan	Rp
K.3. Subsektor Sewa Bangunan	
Jumlah usaha persewaan bangunan dan	
tanah	unit
Total nilai persewaan yang dicapai	Rp
Biaya yang dikeluarkan	Rp
	Rp
K.4. Subsektor Jasa Perusahaan	
Jumlah perusahaan jasa	jenis
Nilai transaksi perusahaan jasa	Rp
Biaya yang dikeluarkan	Rp
Biaya lainnya	Rp
L. SEKTOR JASA-JASA	
L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum	
Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan	
kepada masyarakat	unit
Nilai transaksi pelayanan pemerintahan	
kepada masyarakat	Rp
Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan	Rp
L.2. Subsektor jasa swasta	
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang	
disediakan masyarakat	jenis
Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial	Rp
Biaya yang dikeluarkan	Rp
L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi	·
Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi	jenis
Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan	
rekreasi	Rp
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp
L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah	
Tangga	
Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan	
perorangan dan rumah tangga	jenis
Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan	
rumah tangga	Rp
Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan	
rumah tangga	Rp
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp
M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	
M. 1. Subsektor Angkutan	
Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang	
dan barang dengan alat angkut kendaraan	1
jalan raya, laut, rel, udara, dan	1
sungai/danau/penyeberangan	jenis
Jumlah total kendaraan angkutan	unit
Nilai total transaksi pengangkutan	Rp
Nilai total biaya yang dikeluarkan	Rp

M.2. Subsektor jasa Penunjang angkutan	
Jumlah jenis kegiatan jasa pelabuhan,	
terminal, tambatan, agensi, ekspedisi, tol,	
bongkar ınuat dan parkir	jenis
Jumlah total nilai transaksi jasa penunjang	
angkutan	Rp
Nilai biaya antara yang dikeluarkan	Rp
M.3. Subsektor Komunikasi	
Jumlah jenis kegiatan informasi dan	
telekomunikasi serta jasa penunjang lainnya	jenis
Jumlah nilai aset telekomunikasi dan	
informasi yang ada	Rp
Nilai transaksi informasi dan telekomunikasi	•
yang dicapai	Rp
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp
N. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM	
N.1. Subsektor Listrik	
Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan	
penyaluran tenaga listrik	jenis
Jumlah nilai produksi listrik	Rp
Jumlah total nilai transaksi	Rp
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan	Rp
N.2. Subsektor Gas	
Jumlah kegiatan penyediaan gas	jenis
Nilai aset produksi gas	Rp
Nilai transaksi	. Rp
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp
Didya arrana jang	
N.3. Subsektor Air Minum	
Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan	·
penyaluran air minum	jenis
Nilai aset penyediaan air minum	Rp
Nilai produksi air minum	Rp
Nilai transaksi air minum	Rp
Biaya antara yang dikeluarkan	
NILAI TOTAL PENDAPATAN DOMESTIK	
DESA / KELURAHAN BRUTO DARI SEMUA	
SEKTOR (% total nilai produksi dan	
transaksi terhadap total biaya yang	
dikeluarkan dari semua sektor)	Rp

IV. PENDAPATAN PERKAPITA

A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha

A.1. PERTANIAN	
1. Jumlah rumah tangga petani	Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga petani	orang
2. Jumian total alignota ruman tangga potenti	Keluarga
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	orang
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh petani	1
5. Cumlah pendapatan perkapita dari sektor pertanian untuk setiap rumah tangga pertanian	Rp
A.2. PERKEBUNAN	
1. Jumlah rumah tangga perkebunan	Keluarga

FORMAT LAPORAN

PROFIL DESA DAN KELURAHAN

TINGKAT DESA DAN KELURAHAN

DESA/KELURAHAN

: SAKA TAMIANG

KECAMATAN

: KAPUAS BARAT

KABUPATEN

: KAPUAS

PROVINSI

: KALIMANTAN TENGAH

BULAN

: JANUARI

TAHUN

: 2017

DI PERBANYAK OLEH

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017

FORMAT LAPORAN PROFIL DESA DAN KELURAHAN

TINGKAT DESA DAN KELURAHAN

Desa/Kelurahan	:	SAKA TAMIANG
Kecamatan	:	KAPUAS BARAT
Kabupaten/Kota	:	KAPUAS
Provinsi	:	KALIMANTAN TENGAH
Bulan	:	JANUARI
Tahun	:	2017

SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGISI DATA PROFIL DESA/KELURAHAN

1.	DATA PROFIL LAMA
	LAPORAN PERBULAN PENDUDUK DESA
	RPIMDes
5	

Kepala Desa/Lurah,

Nama, tanda langan & cap

DATA POTENSI DESA DAN KELURAHAN

I. POTENSI SUMBER DAYA ALAM

A. POTENSI UMUM

1. a. Batas Wilayah

Batas	Desa/kelurahan	Kecamatan	
Sebelah utara	TELUK HIRI	KAPUAS BARAT	
Sebelah selatan	PALINGKAU SEJAHTERA SP.1	KAPUAS MURUNG	
Sebelah timur	PANTAL	KAPUAS BARAT	
Sebelah barat	PENDA KATAPI	KAPUAS BARAT	

1.b. Penetapan Batas dan Peta Wilayah

Penetapan Batas	Dasar Hukum Peta Wilayah		
Sudah ada /halum ada	D. I. N.		
Sudah ada/belum ada		Ada/tidak	
	Perda No		

2. Luas wilayah menurut penggunaan

	<u>i</u>
Luas pemukinian	49 ha/ m2
Luas persawahan	926ha/ m2
Luas perkebunan	1500 ha/m2
Luas kuburan	2
Luas pekarangan	ha/m2
Luas taman	ha/m2
Perkantoran	1
Luas prasarana umum lainnya	ha/ m2
Total luas	ha/m2

11	
TANAH SAWAH	
Sawah irigasi teknis	ha/m2
Sawah irigasi ½ teknis	ha/m2
Sawah tadah hujan	ha/m2
Sawah pasang surut	500 ha/ m2
	ha/m2
Total luas	ha/m2
TANAH KERING	·
Tegal/ladang	23 ha/ m2
Pemukiman	4.9 ha/ m2
Pekarangan	1500 ha/ m3
	ha/m2
Total luas	ha/m2
TANAH BASAH	
Tanah rawa	ha/m2
Pasang surut	500 ha/ m2
Lahan gambut	ha/m2
Situ/waduk/danau	ha/m2
	ha/m2
Total luas	ha/m2

TANAH PERKEBUNAN	
Tanah perkebunan rakyat	8.0.0 ha/m2
Tanah perkebunan negara	ha/m2
Tanah perkebunan swasta	ha/m2
Tanah perkebunan perorangan	2.0.0 ha/ m2
	ha/m2
Total luas	
TANAH FASILITAS UMUM	
Kas Desa/Kelurahan:	ha/m2
a. Tanah bengkok	
b. Tanah titi sara	ha/m2
c. Kebun desa	ha/m2
d. Sawah desa	ha/m2
Lapangan olahraga	1,.8 ha/ m 2
Perkantoran pemerintah	1
Ruang publik/taman kota	ha/m2
Tempat pemakaman desa/umum	2
Tempat pembuangan sampah	ha/m2
Bangunan sekolah/perguruan tinggi	3
Pertokoan	ha/m2
Fasilitas pasar	200 ha/m2
Terminal	ha/m2
Jalan	5,3 ha/ m2
Daerah tangkapan air	ha/m2
Usaha perikanan	ha/m2
Sutet/aliran listrik tegangan tinggi	ha/m2
	ha/m2
Total luas	ha/m2
TANAH HUTAN	
Hutan lindung	25.0 ha/ m2
Hutan produksi	ha/m2
a. Hutan produksi tetap	ha/m2
b. Hutan terbatas	ha/m2
Hutan konservasi	ha/m2
Hutan adat	ha/m2
Hutan asli	ha/m2
Hutan sekunder	
Hutan buatan	ha/m²
Hutan mangrove	ha/m2
Hutan suaka	ha/m2
a. Suaka alam	ha/m2
b. Suaka margasatwa	ha/m2
Hutan rakyat	ha/m2
	ha/m2
Total luas	ha/m2
3. Iklim	Mm
Curah hujan	
Jumlah bulan hujan	•
TC -1 h	
Kelembapan	0C
Kelembapan Suhu rata-rata harian Tinggi tempat dari permukaan laut	mdl

4. Jenis dan kesuburan tanah

Warna tanah (sebagian besar)	Merah/kuning/hitam/abu-abu
Tekstur tanah	Lampungan/pasiran/debuan
Tingkat kemiringan tanah	derajat
Lahan kritis	ha/m2
Lahan terlantar	ha/m2
	ha/m2
Tingkat erosi tanah	
Luas tanah erosi ringan	ha/m2
Luas tanah erosi sedang	ha/m2
Luas tanah erosi berat	ha/m2
Luas tanah yang tidak ada erosi	ha/m2

5. Topografi

5. Topografi		
Bentangan wilayah		
Desa/kelurahan dataran rendah		ha/m2
Desa/kelurahan berbukit-bukit	Ya/tidak	ha/m2
Desa/kelurahan dataran	i	
tinggi/pegunungan	Ya/tidak	ha/m2
Desa/kelurahan lereng gunung	Ya/tidak	ha/m2
Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir	Ya/tidak	ha/m2
Desa/kelurahan kawasan rawa	Ya/tidak	ha/m2
Desa/kelurahan kawasan gambut	Ya/tidak	ha/m2
Desa/kelurahan aliran sungai	Ya/tidak	ha/m2
Desa/kelurahan bantaran sungai	Ya/tidak	ha/m2
Letak		
Desa/kelurahan kawasan perkantoran	Ya/tidak	ha/m2
Desa/kelurahan kawasan pertokoan/		
bisnis	Ya/tidak	ha/m2
Desa/kelurahan kawasari campuran	Ya/tidak	ha/m2
Desa/kelurahan kawasan industri	Ya/tidak	ha/m2
Desa/Kelurahan kepulauan	Ya/tidak	ha/m2
Desa/Kelurahan pantai/pesisir	Ya/tidak	ha/m2
Desa/Kelurahan kawasan hutan	Ya/tidak	ha/m2
Desa/Kelurahan taman suaka	Ya/tidak	ha/m2
Desa/Kelurahan kawasan wisata	Ya/tidak	ha/m2
Desa/Kelurahan perbatasan dengan		
negara lain	Ya/tidak	ha/m2
Desa/Kelurahan perbatasan dengan		
provinsi lain	Ya/tidak	ha/m2
Desa/Kelurahan perbatasan dengan		
kabupaten lain	Ya/tidak	ha/m2
Desa/Kelurahan perbatasan antar	,	
kecamatan lain	Ya/tidak	ha/m2
Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai	Ya/tidak	ha/m2
Desa/kelurahan rawan banjir	Ya/tidak	ha/m2
Desa/kelurahan bebas banji:	Ya/tidak	ha/m2
	Ya/tidak	ha/m2
Desa/kelurahan potensial tsunami	Ya/tidak	ha/m2
Desa/keluranan rawan jalur gempa bumi	la, cidan	111111111111111111111111111111111111111

Orbitasi		
Jarak ke ibu kota kecamatan	1.7	Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota	± 30 m	Km enit Jam
kecamatan dengan kendaraan bermotor		
Lama jarak tempuh ke ibu kota		
kecamatan dengan berjalan kaki atau		
kendaraan non bermotor		Jam
Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan	4unit	Ada/tidak
Jarak ke ibu kota kabupaten/kota	50	Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota		
kabupaten dengan kendaraan bermotor	<u>±</u> 1,5 Jam	
Lama jarak tempuh ke ibu kota		
kabupaten dengan berjalan kaki atau		
kendaraan non bermotor		Jam
Kendaraan umum ke ibu kota	Jam #. unit Ada/ tidak	
kabupaten/kota		
·		·
Jarak ke ibu kota provinsi		
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi		
dengan kendaraan bermotor	#. 2. Jam. 46. 910% Jam	
Lanıa jarak tempuh ke ibu kota provinsi		
dengan berjalan kaki atau kendaraan		
non bermotor		Jam
Kendaraan umum ke ibu kota provinsi	4unit	Ada/tidak

B. PERTANIAN

B.1. TANAMAN PANGAN

1. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian	31.5 keluarga
Tidak memiliki	12.3keluarga
Memiliki kurang 1 ha	l.l.0keluarga
Memiliki 1,0 – 5,0 ha	2.05keluarga
Memiliki 5,0 – 10 ha	 keluarga
Memiliki lebih dari 10 ha	keluarga
Jumlah total keluarga petani	keluarga

2. Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini

Ha	Ton/ha
Ha	Ton/ha
Ha	Ton/ha
Ha	Ton/ha
	Ton/ha
	Ton/ha
9.26 Ha	Ton/ha
29 Ha	Ton/ha
Ha	Ton/ha
На	Ton/ha
Ha	Ton/ha
Ha	Ton/ha
	Ha Ha Ha Ha Ha 9.26 Ha 29 Ha Ha Ha Ha

Bawang putih	На	Ton/ha
Tomat	Ha	Ton/ha
Sawi	Ha	Ton/ha
Kentang	На	Ton/ha
Kubis	Ha	Ton/ha
Mentimun	Ha	Ton/ha
Buncis	Ha	Ton/ha
Brocoli	Ha	Ton/ha
Terong	На	Ton/ha
Bayam	Ha	Ton/ha
Kangkung	Ha	Ton/ha
Kacang turis	На	Ton/ha
Umbi-umbian lain	Ha	Ton/ha
Selada	Ha	Ton/ha
Talas .	Ha	Ton/ha
Wortel	Ha	Ton/ha
Tumpang Sari	Ha	Ton/ha
	Ha	Ton/ha
	На	Ton/ha

3. Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan

A. Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan

Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan	keluarga
Tidak memiliki	keluarga
Memiliki kurang dari 10 ha	keluarga
Memiliki 10 - 50 ha	keluarga
Memiliki 50 – 100 ha	keluarga
Memiliki 100 - 500 ha	keluarga
Memiliki 500 - 1000 ha	keluarga
Memiliki lebih dari 1000 ha	keluarga
Jumlah total keluarga perkebunan	keluarga

B. Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-buahan

Jeruk	На	Ton/ha
Alpokat	На	Ton/ha
Mangga	На	Ton/ha
Rambutan	На	Ton/ha
Manggis	На	Ton/ha
Salak	На	Ton/ha
Apel	На	Ton/ha
Pepaya	На	Ton/ha
Belimbing	На	Ton/ha
Durian	На	Ton/ha
Sawo	На	Ton/ha
Duku	На	Ton/ha
Kokosan	На	Ton/ha
Pisang	На	Ton/ha
Markisa	На	Ton/ha
Lengkeng	На	Ton/ha
Semangka	Ha	Ton/ha
Limau	На	Ton/ha

Jeruk nipis	На	Ton/ha
Melon	На	Ton/ha
Jambu air	На	Ton/ha
Nangka	На	Ton/ha
Sirsak	На	Ton/ha
Kedondong	На	Ton/ha
Anggur	На	Ton/ha
Melinjo	На	Ton/ha
Nenas	На	Ton/ha
Jambu klutuk	На	Ton/ha
Murbei	На	Ton/ha

4. Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Tanaman Buah-buahan

Dijual langsung ke konsumen	Ya/ Tidak
Dijual ke pasar	Ya/Tidak
Dijual melalui KUD	Ya/Tidak
Dijual melalui tengkulak	Ya/Tidak
Dijual melalui pengecer	Ya/Tidak
Dijual ke lumbung desa/kel	¥a/Tidak
Tidak dijual	Ya/Tidak

B.2 TANAMAN APOTIK HIDUP DAN SEJENISNYA

	Luas	Hasil panen
Jenis Tanaman	(ha)	(Ton/ha)
Jahe	ha	ton/ha
Kunyit	ha	ton/ha
Lengkuas	ha	ton/ha
Mengkudu	ha	ton/ha
Daun Dewa	ha	ton/ha
Kumis kucing	ha	ton/ha
Buah Merah	ha	ton/ha
Sambiloto	ha	ton/ha
Temulawak	ha	ton/ha
Temu Hitam	ha	ton/ha
Temu Putih	ha	ton/ha
Temu Putri	ha	ton/ha
Temu Kunci	ha	ton/ha
Daun Sirih	ha	ton/ha
Kayu manis	ha	ton/ha
Daun sereh	ha	ton/ha
Mahkota dewa	ha	ton/ha
Akar wangi	ha	ton/ha
Kencur	ha	ton/ha
Jamur	ha	ton/ha
Dewi-Dewi	ha	ton/ha
	ha	ton/ha

C. PERKEBUNAN

1. Pemilikan Lahan Perkebunan

Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan	1.1.3keluarga
Tidak memiliki	7.9keluarga
Memiliki kurang dari 5 ha	keluarga
Memiliki 10 – 50 ha	keluarga
Memiliki 50 - 100 ha	keluarga
Memiliki 100 - 500 ha	keluarga
Memiliki 500 – 1000 ha	keluarga
Memiliki lebih dari 1000 ha	keluarga
Jumlah total keluarga perkebunan	keluarga
Kepemilikan Usaha Perkebunan Yang Dimiliki	
Negara	
Total Luas Perkebunan	

2. Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas

	Swasta/negara		Rakyat	
Jenis	Luas (ha)	Hasil (kw/ha)	Luas (ha)	Hasil (kw/ha)
Kelapa		,		
Kelapa sawit	1.8.9.3			
Kopi				
Cengkeh				
Coklat				
Pinang				
Lada				
Karet			1.5.2	
Jambu Mete				
Tembakau				
Pala				
Vanili				
Jarak pagar				
Jarak kepyar				
Tebu			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Kapuk				
Kemiri				
Teh				
Lain-lain			4.9	

3. Pemasaran Hasil Perkebunan

Dijual langsung ke konsumen	Ya/Tidak
Dijual ke pasar hewan	¥a/Tidak
Dijual melalui KUD	¥a/Tidak
Dijual melalui Tengkulak	Ya/T ida k
	Ya/Tidak
Dijual melalui Pengecer Dijual ke lumbung desu/kel	Ya/Tidak
Tidak dijual	¥a/Tidak
I lidak dijuai	

D. KEHUTANAN

1. Luas Lahan Menurut Pemilikan

Milik Negara	ha
Milik Adat/Ulayat	ha
Perhutani/Instansi Sektoral	ha
Milik masyarakat perorangan	ha
Total	ha

2. Hasil Hutan

Voini	1.727.1
Kayu	M ³ /th
Madu lebah	liter/th
Rotan	Ton/th
Damar ¹	Ton/th
Bambu	M³/th
Jati	M ³ /th
Nilam	Ton/th
Lontar	Ton/th
Sagu	Ton/th
Enau	Ton/th
Mahoni	M ³ /th
Cemara	M ³ /th
Kayu cendana	Ton/th
Kayu gaharu	Ton/th
Sarang burung	Ton/th
Meranti	M³/th
Kayu besi	M ³ /th
Kayu ulin	M ³ /th
Kemenyan	Ton/th
Gainbir	Ton/th
Minyak kayu putih	Ton/th
Gula enau	Ton/th
Gula lontar	Ton/th
Arang	

3. Kondisi Hutan

Kondisi Hutan	Baik	Rusak	Total
Hutan Bakau/mangrove	ha	ha	ha
Hutan Produksi	ha	ha	ha
Hutan Lindung	ha	ha	ha
Hutan Suaka Margasatwa	ha	ha	ha
Hutan Suaka Alam	ha	ha	ha

4. Dampak yang Timbul dari Pengolahan Hutan

Pencemaran Udara	Ada/Tidak
Pencemaran Air	Ada/Tidak
Longsor/Erosi	Ada/Tidak
Bising	Ada/Tidak
Kerusakan biota/plasma nuftah hutan	Ada/Tidak

7/	
Kemusnahan flora,fauna dan satwa langka	Ada/Tidak
Hilangnya sumber mata air	Ada/Tidak
Kebakaran hutan	Ada/Tidak
Terjadinya kekeringan/sulit air	Ada/Tidak
Berubahnya fungsi hutan	Ada/Tidak
Terjadinya lahan kritis	Ada/Tidak
Hilangnya daerah tangkapan air (cacthment area)	Ada/Tidak
Musnahnya Habitat Binatang Hutan	Ada/Tidak
5	Ada/Tidak

Mekanisme Pemasaran Hasil Hutan

Dijual langsung ke konsumen	Ya/Tidak
Dijual ke pasar	Ya/Tidak
Dijual melalui KUD	<u>Ya</u> /Tidak
Dijual melalui Tengkulak	Ya/Tidak
Dijual melalui Pengecer	¥a/Tidak
Dijual ke lumbung desa/kel	· ¥a/Tidak
Tidak dijual	

E. PETERNAKAN

1. Jenis populasi ternak

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan Jumlah Populasi
Sapi	orang	ekor
Kerbau	orang	ekor
Babi	orang	ekor
Ayam kampung	1.2.0 orang	12.2.5 ekor
Jenis ayam broiler	1 orang	.7 ekor
Bebek	1 orang ´	ekor
Kuda	orang	ekor
Kambing		1.2 ekor
Domba	orang	ekor
Angsa	1 orang	1 ekor
Burung puyuh	orang	ekor
Kelinci	2 orang	1.3 ekor
Burung walet	1.0 orang	ekor
Anjing	2 orang	3 ekor
Kucing	34 orang	45 ekor
Ular cobra	orang	ekor
Burung onta	orang	ekor
Ular pithon	orang	ekor
Burung cendrawasih	orang	ekor
Burung kakatua	orang	ekor
Burung beo	orang	ekor
Burung merak	orang	ekor
Burung langka lainnya	orang	ekor
Buaya	orang	ekor
	orang	ekor

2. Produksi Peternakan

Susu	kg/th
Y7 1'	M/th
Telur	kg/th

Daging	kg/th
Madu	Lt/th
Bulu	kg/th
Air liur burung walet	kg/th
Minyak	lt/th
Hiasan/lukisan	unit/th
Cinderamata	unit/th

3. Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak

Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll)	ha
Produksi hijauan makanan ternak	Ton/ha
Luas lahan gembalaan	ha
Dipasok dari luar desa/kelurahan	
Disubsidi dinas	Ton
	Ton

4. Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Ternak

Dendeng	orang
Abon	orang
Penyamakan Kulit	orang
Madu Lebah	orang
Biogas	orang
Telur Asin	orang
Krupuk Kulit	orang
Penyemakan kulit	orang
Kerajinan tangan (handy craft)	orang
	orang
	·

5. Pemasaran Hasil Ternak

Dijual langsung ke konsumen	Ya/Tidak
Dijual ke pasar hewan	Ya/Tidak
Dijual melalui KUD	¥a/Tidak
Dijual melalui tengkulak	Ya/Tidak
Dijual melalui pengecer	Ya/Tidak
Dijual ke lumbung desa/kel	Ya/Tidak
Tidak dijual	Ya/Tidak

6. Ketersediaan lahan pemeliharaan ternak/padang penggembalaan

Milik masyarakat umum	ha
Milik perusahaan peternakan (ranch)	ha
Milik perorangan	ha
Sewa pakai	ha
Milik pemerintah	ha
Milik masyarakat adat	ha

F. PERIKANAN

1. Jenis dan alat produksi budidaya ikan laut dan payau

Karamba	unit	ton/th
Tambak	ha	ton/th
Jermal	unit	ton/th
Pancing	unit	ton/th
Pukat	unit	ton/th
Jala	unit	ton/th
	ha	ton/th

2. Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar

Karamba	unit	ton/th
Empang/kolam	ha/m2	ton/th
Danau	ha/m2	ton/th
Rawa	ha/m2	ton/th
Sungai	ha/m2	ton/th
Sawah	ha/m2	ton/th
Jala	unit	ton/th
Pancingan	unit	ton/th

3. Jenis ikan dan produksi

•	
Tuna	ton/th
Salmon	ton/th
Tongkol/cakalang	ton/th
Hiu	ton/th
Kakap	ton/th
Tenggiri	ton/th
Jambal	ton/th
Pari	ton/th
Kuwe	ton/th
Belanak	ton/th
Cumi	ton/th
Gurita	ton/th
Sarden	ton/th
Bawal	ton/th
Baronang	ton/th
Kembung	ton/th
Ikan ekor kuning	ton/th
Kerapu/Sunuk	ton/th
Teripang	ton/th
Barabara	ton/th
Cucut	ton/th
Layur	ton/th
Ayam-ayam	ton/th
Udang/lobster	ton/th
Tembang	ton/th
Bandeng	ton/th
Nener	ton/th
Kerang	
Kepiting	
Mas	ton/th
Rajungan	ton/th
Mujair	

V natiqma.

u1/пот	
	Katak
di\not	Қодок
di/noi	
u1/по1	Rumput laut
d1/not	Penyu
q1/uo1 ·····	Belut
	Сигате
d1/not	Sepat
d1/no1	
41/not	· sliN
tl /noi	Ratin
d1/no1	Gabus
	Lele
\day\aop\	

4. Peniasaran Hasil Perikanan

	Tidak dijual
ומ/ ווממני	Dijual ke lunibung desa/kel
Ya/Tidak Ya/Tidak	Dijual melalui Pengecer
YahiT\ay	Dijual melalui Tengkulak
Xa/Tidak	Dijual melalui KUD
Ya/Tidak	Dijual ke pasar hewan
Ya/Tidak	Dijual langsung ke konsumen

G. BAHAN GALIAN

1. Jenis dan deposit bahun galian

	Tanah liat
-Ada/Tidak	Bouxit
AsbiT\sbA-	muinatU
AbiT. Ada/	Biji Besi
AebiT\ebA.	Tanah Garam
AdelTidak.	AsmiT
Aeb/Tidak	Kulit kerang
Aca/Tidak	Gas Alam
AsbiT\sbA	Minyak Bumi
AbiT\sbA.	Batu Gips
AsbiT/sbA	Pasir Besi
Ada/Tidak	Pasir Batu
Ada/Tidak	Batu Putih
AsbiT\sbA	Batu Trass
AbiT\abA	Mangan
AbalTidak Aba	Batu Gamping
Ada/Tidak Ada/Tidak	Batu Granit
Asb/Tidak	Batubara
AsbiT\sb <u>A</u>	Pasir kwarsa
AsbiT\sh.A	Batu apung
Ada/Tidak	Batu cadas
Ada/Tidak	Batu marmer
AsbiT\sbA	Belerang
Ada/Tidak	
Ada/Tidak	Emas
Ada/Tidak	Pasir
AsbiT\sb <u>A</u>	Batu kapur
Ada/Tidak	Batu gunung
Ada/Tidak	Batu kali
Ada/Tidak	iled itted

2. Produksi bahan galian

Batu kapur	Pagar/Sada /II
Pasir	Besar/Sedang/Kecil
Emas	Besar/Sedang/Kecil
Kuningan	Besar/Sedang/Kecil
Aluminium	Besar/Sedang/Kecil
Perunggu	Besar/Sedang/Kecil
	Besar/Sedang/Kecil
Belerang	Besar/Sedang/Kecil
Batu marmer	Besar/Sedang/Kecil
Batu cadas	Besar/Sedang/Kecil
Batu apung	Besar/Sedang/Kecil
Pasir kwarsa	Besar/Sedang/Kesil
Batubara	Besar/Sedang/Kecil
Batu Granit	Besar/Sedang/Kecil
Batu Gamping	Besar/Sedang/Kecil
Mangaan	Besar/Sedang/Keeil
Batu Trass	Besar/Scdang/Kecil
Batu Putih	Besar/Sedang/Kecil
Pasir Batu	Besar/Sedang/Kecil
Pasir Besi	Besar/Sedang/Kecil
Gips	Besar/Sedang/Kecil
Minyak Bumi	Besar/Scdang/Kecil
Gas Alam	Besar/Sedang/Keeil
Perak	Besar/Sedang/Kecil
Timah	Besar/Sedang/Keeil
Garam	Besar/Sedang/Keeil
Tembaga	Besar/Sedang/Kecil
Biji Besi	Besar/Sedang/Kecil
Uranium	Besar/Sedang/Kecil
Bouxit	Besar/Sedang/Keeil
Nikel	Besar/Sedang/Kecil
	Besar/Sedang/Kecil

3. Kepemilikan dan Pengelolaan Bahan Galian

Jenis dan produksi bahan galian	Pengelola/pemilik
Batu kali	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Batu kapur	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Pasir	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Emas	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Kuningan	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Aluminium	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Perunggu	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Belerang	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Batu marmer	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Batu cadas	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Batu apung	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Pasir kwarsa	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Batubara	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Batu Granit	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Batu Gamping	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Mangaan	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Batu Trass	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll

Batu Putih	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Pasir Batu	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Pasir Besi	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Gips	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Minyak Bumi	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Gas Alam	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Perak	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Timah	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Tembaga	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Biji Besi	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Uranium	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Bouxit	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
Garam	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll
	Pemerintah/Swasta/Perorangan/Adat/dll

4. Pemasaran Hasil Galian

Dijual langsung ke konsumen	Ya/Tidak
Dijual ke pasar hewan	· Ya/Tidak
Dijual melalui KUD	Ya/Tidak
Dijual melalui Tengkulak	Ya/Tidak
Dijual melalui Pengecer	Ya/Tidak
Dijual ke perusahaan	Ya/Tidak
Dijual ke lumbung desa/kel	Ya/tidak
Tidak dijual	Ya/tidak

H. SUMBER DAYA AIR

1. Potensi Air dan Sumber Daya Air

Sungai	Debit: keeil/sedang/besar
Danau	Volume: kecil/sedang/besar
Mata Air	Debit: keeil/sedang/besar
Bendungan/waduk/situ	Volume: kecil/sedang/besar
Embung-embung	Volume: kecil/sedang/besar
Jebakan air	Volume: kecil/sedang/besar

2. Sumber Air Bersih

Jenis	Jumlah (Unit)	Pemanfaat (KK)	Kondisi Baik/Rusak
Mata air			
Sumur gali			
Sumur pompa	9	7 5	Baik
Hidran umum			
PAM			
Pipa			6
Sungai	12	4.00	BAIK
Embung			7 11
Bak penampung air hujan		<u> </u>	Bai 15
Beli dari tangki swasta			
Depot isi ulang			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Sumber lain			

3. Kualitas Air Minum

Mata air	Berbau/berwarna/berasa/baik
Sumur gali	Berbau/berwarna/berasa/baik
Sumur pompa	Berbau/berwarna/berasa/baik
Hidran umum	Berbau/berwarna/berasa/baik
PAM	Berbau/berwarna/berasa/baik
Pipa	Berbau/berwarna/berasa/baik
Sungai	Tercemar / pendangkalan/baik
Bak penampung air hujan	Berbau/berwarna/berasa/baik
Beli dari tangki swasta	Berbau/berwarna/berasa/baik
Depot isi ulang	Berbau/berwarna/berasa/baik
	Berbau/berwarna/berasa/baik

4. Sungai

Jumlah sungai	12 buah
Kondisi	
Tercemar	Ya tidak
Pendangkalan/Pengendapan Lumpur Tinggi	Ya/tidak
Keruh	Ya/tidak
Jernih dan Tidak Tercemar/memenuhi baku mutu air	Ya/tidak
Berkurangnya biota sungai	Ya/tidak
Kering	Ya/tidak

5. Rawa

Luas rawa	ha
Pemanfaatan	
Perikanan darat maupun laut	Ya/ tidak
Air baku untuk pengolahan air minum	Ya/ tidak
Cuci dan mandi	Ya/ tidak
Irigasi	Ya/ tidak
Buang air besar	Ya/ tidak
Perikanan	Ya/ tidak
Sayuran	Ya/ tidak
Penibudidayaan hutan manggrove	Ya/ tidak

6. Pemenfaatan dan kondisi danau/waduk/situ

Luas	ha
Pemanfaatan	
Perikanan	Ya/ tidak
Air Minum/Air Baku	Ya/ tidak
Cuci dan mandi	Ya/ tidak
	Ya/ tidak
Irigasi Dana a sin basar	Ya/ tidak
Buang air besar	Ya/ tidak
Pembangkit listrik	Ya/ tidak
Prasarana transportasi	Ya/ tidak
Lainnya	Tay tidak
Kondisi	Ya/ tidak
Tercemar	
Pendangkalan	
Keruh	Ya/ tidak Ya/ tidak
Berlumpur	la/ tidak

7. Air Panas

	Jumlah	Pemanfaatan (wisata, Pengobatan		milikan/Pengelolaan	
Sumber	Lokasi	Energi, dll) Pemda	Pemda	Swasta	Adat/ Perorangan
Gunung Berapi					
Geiser					
	-				

I. KUALITAS UDARA

Sumber	Jumlah Lokasi	Polutan	Efek terhadap Kesehatan Kepemilika (ganguan		an	
	Sumber	Pencemar	penglihatan/	Pemda	Swasta	Per-
	Pendemar		kabut, ISPA, dll			orangan
Pabrik (kapur,						
marmer, dll)						
Kendaraan						
bermotor						
Pembakaran						
Hutan/Lahan						
Gambut						

J. KEBISINGAN

Tingkat Kebisingan	Ekses dampak kebisingan	Sumber Kebisingan (kendaraan bermotor, Kereta Api, Pelabuhan, Airport, pabrik, dll)	Efek Terhadap Penduduk
Kebisingan Tinggi	Ya / Tidak		
Kebisingan sedang	¥a/ Tidak		
Kebisingan Ringan	Ya/ Tidak	Motor, usaha Kayu	Tidak ada
Tidak Bising	¥a/ Tidak		

K. RUANG PUBLIK/TAMAN

Ruang Publik/	Keberadaan	Luas	Tingkat Pemanfaatan
Taman			(Aktif/Pasif)
Taman Kota	ada/ tidak ada	M²	Aktif/Pasif
Taman Bermain	ada/ tidak ada	M²	Aktif/Pasif
Hutan Kota	ada/ tidak ada	M ²	Aktif/Pasif
Taman Desa/Kel.	ada/ tidak ada	M²	Aktif/Pasif
Tanah Kas Desa	ada/ tidak ada	M ²	Aktif/Pasif
Tanah Adat	ada/ tidak ada	M ²	Aktif/Pasif
,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Jumlah	n Total	M²	

L. POTENSI WISATA

Lokasi/ Tempat/ Area Wisata	Keberadaan	Luas	Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif)
Laut (Wisata Pulau, Taman Laut, Situs Sejarah Bahari, Pantai dll)	Ada/ Tidak ada	ha	Aktif/Pasif
Danau (Wisata Air, Hutan Wisata, Situs Purbakala, dll)	Ada/ tidak ada	ha	Aktif/Pasif
Gunung (wisata Hutan, Taman Nasional, Bumi Perkemahan, dll)	Ada/ Tidak ada	ha	Aktif/Pasif
Agrowisa.ta	Ada/ tidak	ha	Aktif/Pasif
Hutan Khusus	Ada/ Tidak ada	ha	Aktif/Pasif
Goa	Ada/ tidak	ha	Aktif/Pasif
Cagar Budaya	Ada/ Tidak ada	ha	Aktif/Pasif
Arung Jeram	Ada/ tidak	ha	Aktif/Pasif
Situs Sejarah, dan museum	Ada/Tidak ada	ha	Aktif/Pasif
Air Terjun	Ada/ tidak	ha	Aktif/Pasif
Padang Savana (wisata Padang Savana)	Ada/Tidak Ada	ha	Aktif/Pasif

II. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

A. JUMLAH

3.6.9 orang
3.2.9 orang
7.9.8 orang
4.8.0KK
39,33 per km

B. USIA

USIA	LAKI-LAKI	PEREMP.	USIA	LAKI-LAKI	PEREMP.
0-12	Dittel Biller		39	2.0	10
bulan	orang	S orang	tahun	3.2orang	
1 tahun	lo orang	.Oorang	40	3orang	orang
2	12 orang	9 orang	41	19 orang	8orang
3	1.3orang	2.0orang	42		5orang

4			43	7orang	8orang
5	15orang	9 orang	44	12orang	6orang
6	23 orang	1.4orang	45	l.lorang	14orang
7	8orang	26orang	46	19orang	6orang
8	2.2.orang	l.lorang	47	\5orang	21orang
9	1.5orang	20orang	48	8orang	3orang
10	3.1orang	23orang	49	7orang	7orang
11	25 orang	i.5 orang	50	1.3orang	i3orang
12	1.9orang	1.3,orang	51	loorang	5 orang
13	26orang	27orang	52	Aorang	g orang
14	i.6 orang	20orang	53	6 orang	14orang
15	33orang	l.lorang	54	12orang	5orang
16	(.Oorang	10orang	55	l.iorang	.6 orang
17		12orang	56	6orang	l0 orang
18	35orang	25orang	57	loorang	6 orang
19	29orang	20orang	58	5orang	!!orang
20	3.2.orang	7orang	59	5orang	3orang
21	22.orang	12orang	60	7 orang	7 orang
22		i.o orang	61	7 orang	9 orang
23	9 orang	7orang	62	5 orang	.5 orang
24	16 orang	23 orang	63	2orang	3 orang
25	2.8 orang	2.2 orang	64	9 orang	lorang
26	2 o orang	i4 orang	65	3 orang	6 orang
27	22 orang	1 <u>4</u> orang	66	lorang	3orang
28	1.5 orang	orang	67	4orang	2 orang
29	9 orang	21orang	68	<u>-</u> orang	5 orang
30	lorang	.24orang	69	3orang	6 orang
31	3 orang	6 orang	70	3orang	4orang
32	18orang	.l.lorang	71	orang	orang
33	lorang	.13orang	72	orang	orang
34	8orang	.25orang	73	orang	orang
35	21orang	.1.7orang	74	orang	orang
36	14orang	.1.1orang	75	orang	orang
37	2.1 orang	.18orang	Lebih	0.00	07077
			dari 75	orang	orang 8.29orang
38	17 orang	.9 orang	Total	.9.69orang	J.o. A.J OTAN

C. PENDIDIKAN

TINGKATAN PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	7.7 orang	6.7 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	2.6 orang	2.4 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	7 orang	3 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	.240.orang	20.0 orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	orang	orang
Usia 18-56 thn pernah SD tetapi tidak tamat	8 orang	3 orang
Tamat SD/sederajat	3.1.2.orang	203 orang
Jumlah usia 12 – 56 tahun tidak tamat SLTP	.i.15.orang	1.2.0 orang
Jumlah usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	5 orang	2 orang
Tamat SMP/sederajat	82 :.orang	9.3 orang
Tamat SMA/sederajat	38orang	5. 6 orang
Tamat D-1/sederajat	orang	orang
Tamat D-2/sederajat	 orang	orang
Tamat D-3/sederajat	orang	orang
Tamat S-1/sederajat	20.orang	3.0 orang
Tarnat S-2/sederajat	orang	orang
Tamat S-3/sederajat	orang	orang
Tamat SLB A	orang	orang
Tamat SLB B	orang	orang
Tamat SLB C	orang	orang

Buta huruf	.3.9orang	2.8 orang
	9.69. orang	8.2.9 orang
Jumlah Total	1.79	orang

D. MATA PENCAHARIAN POKOK

JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Petani	2.19 orang	18.] orang
Buruh tani	92. orang	6.4 orang
Buruh migran perempuan	orang	3.6. orang
Buruh migran laki-laki	58 orang	orang
Pegawai Negeri Sipil	4 orang	1.2 orang
Pengrajin industri rumah tangga	orang	orang
Pedagang keliling	orang	orang
Peternak	1.3 orang	2 orang
Nelayan .	orang	orang
Montir	3 orang	orang
Dokter swasta	orang	orang
Bidan swasta	orang	2 orang
Perawat swasta	orang	orang
Pembantu rumah tangga	orang	orang
TNI	i orang	orang
POLRI	d orang	orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	orang	orang
Pengusaha kecil dan menengah	g orang	orang
Pengacara	orang	orang
Notaris	orang	orang
Dukun Kampung Terlatih	orang	orang
Jasa pengobatan alternatif	orang	orang
Dosen swasta	orang	orang
Pengusaha besar		
Arsitektur	orang	orang
Seniman/Artis	orang	orang
Karyawan perusahaan swasta	25 orang	10 orang
Karyawan perusahaan pemerintah	orang	orang
Tukang	13 orang	orang
Redagang. Kecil. / warung	2 orang	21 orang
.Pedagang. Kecil. / warung	orang	29 orang
Sopir	3 orang	orang
Guru.swasta	2 orang	orang
	orang	orang
	orang	orang
	orang	orang
	orang	orang
Jumlah Total Penduduk		

E. AGAMA

AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Islam	96.5 orang	8:0.4 orang
Kristen	l.l orang	i.8 orang
Katholik	orang	orang
Hindu	orang	
Budha	orang	orang
Khonghucu	orang	orang
Kepercayaan Kepada Tuhan YME	orang	

Aliran Kepercayaan lainnya	orang	orang
Jumlah	969 orang	8.29 orang

F. KEWARGANEGARAAN

KEWARGANEGARAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Warga Negara Indonesia	9.69 orang	8 .2.9 orang
Warga Negara Asing	orang	orang
Dwi Kewarganegaraan	orang	orang
Jumlah	9.6.9 orang	82.9 orang

G. ETNIS

ETNIS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Aceh	orang	orang
Batak	orang	orang
Nias	orang	orang
Mentawai	orang	,orang
Melayu	orang	orang
Minang	orang	orang
Kubu	orang	orang
Anak Dalam	orang	orang
Badui	orang	orang
Betawi	orang	orang
Sunda	1 orang	orang
Jawa	2 orang	orang
Madura	orang	orang
Bali	orang	orang
Banjar	3.1.5 orang	2.2.7 orang
Dayak	6.4.7 orang	6.0.0 orang
Bugis	orang	orang
Makasar	2 orang	orang
Mandar	orang	orang
Sasak	orang	orang
Ambon	orang	orang
Minahasa	orang	orang
Flores	orang	orang
Papua	orang	orang
Timor	2 orang	orang
Sabu	orang	orang
Rote	orang	orang
Sumba	orang	orang
Ternate	orang	orang
Tolaki	orang	orang
Buton	orang	orang
Muna	orang	orang
Mikongga	orang	orang
Wanci	orang	orang
Alor	orang	orang
Benoa	orang	orang
Tunjung	orang	orang
Mbojo	orang	orang
Samawa	orang	orang
Asia	orang	orang orang
Afrika	orang	
Australia	orang	orang

China	orang	orang
Amerika	orang	orang
Eropa	orang	orang
Jumlah	9.6.9 orang	8.2.9 orang

H. CACAT MENTAL DAN FISIK

CACAT FISIK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Tuna rungu	orang	orang
Tuna wicara	orang	orang
Tuna netra	orang	orang
Lumpuh	orang	orang
Sumbing	orang	orang
Cacat kulit	orang	orang
Cacat fisik/tuna	orang	orang
daksa lainnya		
	orang	orang
	orang	orang
Jumlah	orang	orang
		·
CACAT MENTAL		·
Idiot	1 orang	orang
Gila	orang	i orang
Stress	2 orang	orang
Autis	orang	orang
	orang	orang
Jumlah	4 orang	i orang

I. TENAGA KERJA

TENAGA KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Penduduk usia 18-56 tahun	orang	orang
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang bekerja	549. orang	, orang
Penduduk usia 18 - 56 tahun yang belum		
atau tidak bekerja	2.1 . orang	പ്രൂം. orang
Penduduk usia 0 - 6 tahun	7.7. orang	g orang
Penduduk masih sekolah 7-18 th	2.4.0 orang	.7.00. orang
Penduduk usia 56 tahun ke atas	்டு orang	; orang
Angkatan kerja	orang	orang
	orang	orang
Jumlah	969 orang	.829 orang
Jumlah total		orang

J. KUALITAS ANGKATAN KERJA

ANGKATAN KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Penduduk usia 18-56 tahun yang buta aksara dan huruf/angka latin	39 . orang	.28 orang
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tidak tamat SD	.3 orang	ζ orang

Jumlah	4.2.4 orang	.413 orang
.,,		
Perguruan Tinggi	Sec Tasi	20
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat	?∵. orang	ැ orang
SLTA	orang	orang
Penduduk usia 18 - 56 tahun yang tamat	vo., orang	orang
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SLTP	.22. orang	g orang
Penduduk usia 18 – 56 tahun yang tamat SD	313 orang	2. 63. orang

III. POTENSI KELEMBAGAAN

A. LEMBAGA PEMERINTAHAN

PEMERINTAH DESA/KELURAHAN		
Dasar hukum pembentukan	Ada/Tidak	Perda/Keputusan
Pemerintah Desa / Kelurahan	• •	Bupati/Camat/Belum
		Ada Dasar Hukum
Dasar hukum pembentukan BPD	Ada/Tidak	Perda/Keputusan
•	•	Bupati/Camat/Belum
		Ada Dasar Hukum
Jumlah aparat pemerintahan		orang
Desa/Kelurahan	•	
Jumlah perangkat desa/kelurahan		l unit kerja
Kepala Desa/Lurah	Ada/tidak	
Sekretaris Desa/Kelurahan	Ada/tidak	
Kepala Urusan Pemerintahan	Ada/tidak -	Aktif/tidak
Kepala Urusan Pembangunan		Aktif/tidak
Kepala Urusan Pemberdayaan	Ada/tidak -	Aktif/tidak
Masyarakat		
Kepala Urusan Kesejahteraan	Ada/tidak -	· Aktif/tidak
Rakyat		
Kepala Urusan Umum		- Aktif/tidak
Kepala Urusan Keuangan		- Aktif/tidak
Kepala Urusan		- Aktif/tidak
Kepala Urusan	Ada/tidak -	- Aktif/tidak
Jumlah Staf		orang
Jumlah Dusun di Desa/Lingkungan		dusun/lingkungan
di Kelurahan atau sebutan lain	Aktif/tidak	
Kepala Dusun/Lingkungan	Aktif/tidak	
	·	
Tingkat Pendidikan Aparat	SD, SMP,	SMA, Diploma, S1,
Desa/Kelurahan	Pascasarja	na
Kepala Desa/Lurah		
Sekretaris Desa/Kelurahan		
Kepala Urusan Pemerintahan		
Kepala Urusan Pembangunan		••••••
Kepala Urusan Pemberdayaan	1	••••

Masyarakat	
Kepala Urusan Kesejahteraan	***************************************
Rakyat	
Kepala Urusan Umum	
Kepala Urusan Keuangan	
Kepala Urusan	
Kepala Urusan	
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	A.
Keberadaan BPD	Ada/tidak - aktif/tidak
Jumlah Ar.ggota BPD	orang
Pendidikan Anggota BPD	SD, SMP, SMA, Diploma, S1, Pascasarjana
Ketua WARSONO	
TV-1-11 Vatura OFNU	

		Pascasarjana
Ketua	WARSONO	
Wakil Ketua	BENI	
Sekretaris	SIRIAPI	
Anggota, Na	ama :KURIADI	
Anggota, Na	ama:TRISNO	
Anggota, Na	ama:	
Anggota, Na	ama :	
Anggota, Na	ama :	
Anggota, N	ama :	
Anggota, N	ama :	

B. LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/LKK)		
Keberadaan LKD/LKK Ada/tidak - Aktif/tidak		
110001111111111111111111111111111111111		
Dasar hukum pembentukan	Bila Belum ada organisasi LKD/LKK	
	Bila pembentukan LKD/LKK	
	berdasarkan Perdes dan Perda Kab/Kota	
	Berdasarkan Keputusan Bupati/ Wali kota	
	Berdasarkan Keputusan Camat	
	Tidak/belum ada dasar hukum	
Jumlah pengurus	orang	
Alamat kantor		
mamat marto.		
Ruang lingkup kegiatan	Jenis , Yakni	
LKMD/LKMK		
Dasar hukum pembentukan		
Jumlah pengurus	orang	
Alamat kantor		
	Jenis , Yakni	
Ruang lingkup kegiatan	Jenis, rakin	

LPMD/LPMK ATAU SEBUTAN LA	IN
Dasar hukum pembentukan	
Jumlah pengurus	orang
Alamat kantor	
Ruang lingkup kegiatan	Jenis , Yakni
PKK	
Dasar hukum pembentukan	***************************************
Jumlah pengurus	orang
Alamat kantor	
Ruang lingkup kegiatan	Jenis , Yakni
RUKUN WARGA	
JUMLAH RW	unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	
Jumlah pengurus	orang
Alamat kantor	8
Ruang lingkup kegiatan	Jenis , Yakni
RUKUN TETANGGA	
JUMLAH RT	unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	dire of Samodo.
	orang
Jumlah pengurus	orang
Alamat kantor	
D. II. In a landata	Jonia Voleni
Ruang lingkup kegiatan	Jenis , Yakni
KARANG TARUNA	
Dasar hukum pembentukan	
Jumlah pengurus	orang
Alamat kantor	
	Y 1 - 1 - 1
Ruang lingkup kegiatan	Jenis , Yakni
KELOMPOK TANI/NELAYAN	5 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	orang
Jumlah pengurus	1.25orang
Alamat kantor	***************************************
	••••••
	7 1 17-11
Ruang lingkup kegiatan	Jenis Yakni
LEMBAGA ADAT	unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	n orang
Jumlah pengurus	orang
Alamat kantor	***************************************
	Ionia Voleni
Ruang lingkup kegiatan	Jenis, Yakni
BADAN USAHA MILIK DESA	unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	orang
Jumlah pengurus	orang
Alamat kantor	

Ruang lingkup kegiatan	Jenis , Yakni		
ORGANISASI KEAGAMAAN	unit organisasi		
Dasar hukum pembentukan			
Jumlah pengurus	orang		
Alamat kantor			
1			
Ruang lingkup kegiatan	Jenis , Yakni		
ORGANISASI PEREMPUAN LAIN	unit organisasi		
Dasar hukum pembentukan			
Jumlah pengurus	orang		
Alamat kantor			
	,		
Ruang lingkup kegiatan	Jenis , Yakni		
ORGANISASI PEMUDA LAINNYA	unit organisasi		
Dasar hukum pembentukan			
Jumlah pengurus	orang		
Alamat kantor			
Ruang lingkup kegiatan	Jenis , Yakni		
ORGANISASI PROFESI LAINNYA	unit organisasi		
Dasar hukum pembentukan			
Jumlah pengurus	orang		
Alamat kantor			
	•••••		
	T - 27 - 1- 27 - 1- 2		
Ruang lingkup kegiatan	Jenis , Yakni		
ORGANISASI BAPAK	unit organisasi		
Dasar hukum pembentukarı	0707.0		
Jumlah pengurus	orang		
Alamat kantor			
Ruang lingkup kegiatan	Jenis , Yakni		
KELOMPOK GOTONG ROYONG	unit organisasi		
Dasar hukum pembentukan			
Jumlah pengurus	orang		
Alamat kantor			
Maniae Karreor			
Ruang lingkup kegiatan	Jenis , Yakni		
PWI			
Dasar hukum pembentukan			
Jumlah pengurus	orang		
Alamat kantor			
Ruang lingkup kegiatan	Jenis , Yaknį		
IDI			
Dasar hukum pembentukan			
Jumlah pengurus	orang		
ouman pengurus .	l de la companya de		
Alamat kantor			

PARFI	
Dasar hukum pembentukan	
Jumlah pengurus	orang
Alamat kantor	orang
Ruang lingkup kegiatan	Jenis , Yakni
PECINTA ALAM	unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	- Control of the cont
Jumlah pengurus	orang
Alamat kantor	(100
Ruang lingkup kegiatan	Jenis , Yakni
WREDATAMA	
Dasar hukum pembentukan	
Jumlah pengurus	orang
Alamat kantor	3
Ruang lingkup kegiatan	Jenis , Yakni
KELOMPOK PEMIRSA	unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	
Jumlah pengurus	orang
Alamat kantor	
Ruang lingkup kegiatan	Jenis , Yakni
PANTI	unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	
Jumlah pengurus	orang
Alamat kantor	
Ruang lingkup kegiatan	Jenis , Yakni
YAYASAN	! unit organisasi
Dasar hukum pembentukan	
Pemilik	
Jumlah pengurus	orang
Alamat kantor	
Ruang lingkup kegiatan	Jenis , Yakni
LEMBAGA	
Dasar hukum pembentukan	
Jumlah pengunis	orang
Alamat kantor	••••••

Ruang lingkup kegiatan	Jenis , Yakni
LEMBAGA	
Dasar hukum pembentukan	
Jumlah pengurus	Orang
Alamat kantor	orang
Alamat Kantol	
Duang lingleun leggisten	Iania Valeni
Ruang lingkup kegiatan	Jenis , Yakni
C. LEMBAGA POLITIK	
PARTAI GOLKAR	orang
Jumlah Pengurus Jumlah Partai Politik Lokal	orangorang
JumlahPartai Politik Nasional	
	orang
Jumlah Anggota	orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu	2222
Terakhir	orang
Alamat Sekretariat/Kantor	
Dasar Hukum Pembentukan	
Ruang Lingkup Kegiatan	Jenis, Yakni
Organisasi Underbow	•••••
•	
PDIP	
Jumlah Pengurus	orang
Jumlah Anggota	orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu	
Terakhir	orang
Alamat Sekretariat/Kantor	
·	
Dasar Hukum Penibentukan	
Ruang Lingkup Kegiatan	Jenis, Yakni
Organisasi Underbow	
	••••
PPP	
Jumlah Pengurus	orang
Jumlah Anggota	orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu	orang
Terakhir	
Alamat Sekretariat/Kantor	
, i	
Dasar Hukum Pembentukan	
Ruang Lingkup Kegiatan	Jenis, Yakni
Organisasi Underbow	
0.54	
PARTAI DEMOKRAT	
Jumlah Pengurus	oranş
Jumlah Anggota	oran
Jumlah Pemilih pada Pemilu	oran

Lampiran V

Terakhir	
Alamat Sekretariat/Kantor	
Dasar Hukum Pembentukan	
Ruang Lingkup Kegiatan	Jenis, Yakni
Organisasi Underbow	
D A BY	
PAN	07070
Jumlah Pengurus	orang
Jumlah Anggota	orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu	orang
Terakhir	
Alamat Sekretariat/Kantor	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Dasar Hukum Pembentukan	
Ruang Lingkup Kegiatan	Jenis, Yakni
Organisasi Underbow	
Organisasi Onderbow	
·	
PKS	
Jumlah Pengurus	orang
Jumlah Anggota	orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu	orang
Terakhir	
Alamat Sekretariat/Kantor	
mamat Som startas, reserve	
Dasar Hukum Pembentukan	
	Jenis, Yakni
Ruang Lingkup Kegiatan	nam deme, raini
Organisasi Underbow	
PBB	orong
Jumlah Pengurus	orang
Jumlah Anggota	orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu	
Teraknir	orang
Alamat Sekretariat/Kantor	
Dasar Hukum Pembentukan	
Ruang Lingkup Kegiatan	Jenis, Yakni
Organisasi Underhaw	
Organisasi Underbow	

·	
PKB	OFOR
Jumlah Pengurus	oran
Jumlah Anggota	oran
Jumlah Pemilih pada Pemilu	,
Terakhir	'oran
icianiii	
I Alamat Sekretariai / Naiii (ii	
Alamat Sekretariat/Kantor	

Ruang Lingkup Kegiatan	Jenis, Yakni
Organisasi Underbow	
DDD	
PBR	
Jumlah Angarta	orang
Jumlah Anggota	orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu Terakhir	
Alamat Sekretariat/Kantor	orang
Mamat Scrictariat/ Namto	
Dasar Hukum Pembentukan	
Ruang Lingkup Kegiatan	Jenis, Yakni
Organisasi Underbow	
PDS	
Jumlah Pengurus	orang
Jumlah Anggota	orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu	
Terakhir	orang
Alamat Sekretariat/Kantor	
Dasar Hukum Pembentukan	7 - '- V-1'
Ruang Lingkup Kegiatan	Jenis, Yakni
Organisasi Underbow	
DILL	
PUI Jumlah Pengurus	orang
Jumlah Anggota	orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu	
Terakhir	orang
Alamat Sekretariat/Kantor	
Alamat Scrictariat, Kartor	
Dasar Hukum Pembentukan	
Ruang Lingkup Kegiatan	Jenis, Yakni
Organisasi Underbow	
PARTAI	0207
Jumlah Pengurus	orang
Jumlah Anggota	orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu	Orang
Terakhir	orang
Alamat Sekretariat/Kantor	
Dasar Hukum Pembentukan	
Ruang Lingkup Kegiatan	Jenis, Yakni
Organisasi Underbow	
0. Barriousi 0.1.40.	
PARTAI	0.707
Jumlah Pengurus	orang

	_
Jumlah Anggota	orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu	
Terakhir Alamat Sekretariat/Kantor	orang
Alamat Schictariat/ Namtor	
Dasar Hukum Pembentukan	
Ruang Lingkup Kegiatan	Jenis, Yakni
Organisasi Underbow	Jems, rakin
Organisasi Onderbew	
PARTAI	
Jumlah Pengurus	orang
Jumlah Anggota	orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu	
Terakhir	orang
Alamat Sekretariat/Kantor	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
·	
Dasar Hukum Pembentukan	
Ruang Lingkup Kegiatan	Jenis, Yakni
Organisasi Underbow	
	.,
PARTAI	
Jumlah Pengurus	orang
Jumiah Anggota	orang
Jumlah Pemilih pada Pemilu	. orong
Terakhir	orang
Alamat Sekretariat/Kantor	
Dasar Hukum Pembentukan	
Dasar Hanam : om or	
Ruang Lingkup Kegiatan	Jenis, Yakni
Organisasi Underbow	
	,
	it apparings!
ORGANISASI UNDERBOW PARTAI	unit organisasi
Jumlah Pengurus	orang
Jumlah Anggota	orang
Alamat Sekretariat/Kantor	
TV 1 Decided to the second	
Dasar Hukum Pembentukan	Jenis , Yakni
Ruang Lingkup Kegiatan	unit organisasi
ORGANISASI UNDERBOW PARTAI	orang
Jumlah Pengurus	orang
Jumlah Anggota	
Alamat Sekretariat/Kantor	
Dasar Hukum Pembentukan	
Dasar Haitain Lombontain.	
Ruang Lingkup Kegiatan	Jenis , Yakni
L	

Lampiran V

ORGANISASI UNDERBOW PARTAI	unit organisasi
Jumlah Pengurus	orang
Jumlah Anggota	orang
Alamat Sekretariat/Kantor	•••••
Dasar Hukum Pembentukan	
Ruang Lingkup Kegiatan	Jenis , Yakni
ORGANISASI UNDERBOW PARTAI	unit organisasi
Jumlah Pengurus	orang
Jumlah Anggota	orang
Alamat Sekretariat/Kantor	
Dasar Hukum Pembentukan	
Ruang Lingkup Kegiatan	Jenis , Yakni
ORGANISASI UNDERBOW PARTAI	unit organisasi
Jumlah Pengurus	orang
Jumlah Anggota	orang
Alamat Sekretariat/Kantor	
Dasar Hukum Pembentukan	
Ruang Lingkup Kegiatan	Jenis , Yakni
ORGANISASI UNDERBOW PARTAI	unit organisasi
Jumlah Pengurus	orang
Jumlah Anggota	orang
Alamat Sekretariat/Kantor	
Mamar Som Same	
Dasar Hukum Pembentukan	
Ruang Lingkup Kegiatan	Jenis , Yakni

D. LEMBAGA EKONOMI

1. Lembaga Ekonomi, dan Unit Usaha Desa/Kelurahan	Jumlah/unit	Jumlah Kegiatan	Jumlah pengurus dan Anggota
Koperasi Unit Desa			
Koperasi Simpan Pinjam			
Kelompok Simpan Pinjam			
Bumdes			
Jumlah		Jumlah	Jumlah
2. Jasa Lembaga Keuangan	Jumlah/unit	kegiatan	Pengurus
Jasa Asuransi			
Lembaga Keuangan Non Bank			
Bank Perkreditan Rakyat			*************
Pegadaian			
Bank Pemerintah			•••••
Jumlah			

Menengah			
ndustri makanan			
ndustri Alat rumah tangga			••••••
ndustri Material Bahan			
Bangunan			
ndustri Alat Pertanian			•••••
ndustri Kerajinan			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Rumah makan dan restoran			
Jumlah		,	
1. Usaha Jasa Pengangkutan	Jumlah Pemilik	Kapasitas	Tenaga Kerja
Jumlah pemilik Angkutan			
Desa/Perkotaan	orang		orang
Angkutan Antar Kota/Provinsi		•	unit
		 	
Angkutan Sungai			
Jumlah Pemilik Perahu Motor/	00000	l. orang	l orang
Klotok atau sejenisnya	orang	orang	orang
Jumlah pemilik Jet boat	orang	orang	orang
Jumlah angkutan jetboat	orang	1111 01 4118	,,,,,
Jumlah Pemilik Angkutan			
Penumpang Sungai dengan	orang	orang	oran
kapasitas lebih dari 10 orang		1111 01 011	
Jumlah angkutan sungai yang			uni
kapasitas kurang dari 10 kursi			
Jumlah angkutan sungai yang			
kapasitas antara 10 – 100			
Jumlah angkutan sungai yang			
kapasitas antara 100 – 500			
Acceptable Control of the Control of			
Angkutan Laut			
	orang	orang	oran
Jumlah pemilik Jet boat Jumlah Pemilik Perahu Jenis	orang		
	orang	g orang	oran
Ferry/Kapal penumpang Jet Foil	oran		
Angkutan Udara	+		
Jumlah pemilik pesawat jenis			
ringan /helikopter	oran	g orang	orar
Ekspedisi Dan Pengiriman			
Jumlah Pemilik Usaha Jasa		1	
Ekspedisi/Pengiriman Barang	oran	ig oran	g ora

	·	Jenis produk yg	Y11
5. Usaha Jasa dan	Y1-1-	diperdagangkan	Jumlah
Perdagangan	Jumlah	(umum, sayuran,	Tenaga Kerja
		barang & jasa, tambang, dll	yang terserap
Pasar Hasil Bumi/		<u></u>	
Tradisonal/ Harian	unit	jenis	orang
Pasar Mingguan	unit	jenis	orang
Pasar Bulanan	unit	jenis	orang
Pasar Kaget/Pasar Khusus			
(mis. Psr Ternak, dll)	unit	jenis	orang
Jumlah Usaha Toko/Kios	unit	jenis	orang
Swalayan	unit	jenis	orang
Warung Serba Ada	หnit	jenis	orang
Toko Kelontong	unit	jenis	orang
Usaha Peternakan	unit	jenis	orang
Usaha Perikanan	unit	jenis	orang
Usaha Perkebunan	unit	jenis	orang
Usaha Minuman			
(kemasan, dll)	unit	jenis	orang
Industri Farmasi	unit	jenis	orang
Industri Caroseri/cat			
mobil	unit	jenis	orang
Industri Penyamakan Kulit	unit	jenis	orang
Penitipan Kendaraan			
Bermotor	unit	jenis	orang
Industri Perakitan			
Elektronik	unit	jenis	orang
Pengolahan Kayu	unit	jenis	orang
6. Usaha Jasa Hiburan			
Bioskop	unit	jenis	orang
Film Keliling	unit	jenis	orang
Sandiwara/Drama	unit	jenis	
Group Lawak	unit	jenis	orang
Sirkus Keliling/Topeng			
monyet/Ondel-ondel, dll	unit	jenis	orang
Wayang Orang/Wayang			22222
Golek	unit	jenis	
Group Musik/Band	unit	jenis	orang
Group Vokal/Paduan			
Suara	unit	jenis	orang
7. Usaha Jasa Gas,			
Listrik, BBM Dan Air			
Usaha Penyewaan Tenaga		land.	orang
Listrik	unit	, ,	
SPBU	unit		
Pangkalan Minyak Tanah	unit	jjenis	s orang
Pengecer Gas dan Bahan		lani	orang
Bakar Minyak	unit		s orang
Usaha air minum	unit		
kemasan/isi ulang			

8. Usaha Jasa Keterampilan	Jumlah	Jumlah Jenis produk yang diperdagangkan	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap
Tukang Kayu	orang	jenis	orang
Tukang Batu	orang	jenis	orang
Tukang Jahit/Bordir	orang	jenis ,	orang
Tukang Cukur	orang	jenis	.l orang
Tukang Service Elektronik	orang	jenis	orang
Tukang Besi	orang	jenis	orang
Tukang Gali Sumu:	orang	jenis	orang
Tukang Pijat/ Urut/Pengobatan	\$. orang	jenis	5 orang
	77 14	2	
9. Usaha Jasa Hukum dan			orang
Notaris	unit	jenis	orang
Pengacara/Advokat	unit	jenis	orang
Konsultan Manajemen	unit	jenis	orang
Konsultan Teknis	unit		
Pejabat Pembuat Akta Tanah	unit	jenis	orang
	unit	jenis	orang
10. Usaha Jasa Penginap			
Losmen	unit	jenis	orang
Wisma	unit	jenis	orang
Asrama	unit	jenis	orang
Persewaan Kamar	unit	jenis	orang
Kontrakan Rumah	unit	jenis	orang
Mess	unit	jenis	orang
Hotel	unit	jenis	orang
Home Stay	unit unit	jenis	orang
Villa	unit		orang
Town House	unit		
	unit	jenis	orang

E. LEMBAGA PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal

Nama	Jumlah	Status (Terdaftar, terakreditasi)	(Terdastar,		1	Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/ Mahasiswa
		terakreditasij	Pemerintah	Swasta	Desa / Kelurahan		
Play Group						4	50
TK	1	Belum			 	13	214
SD/sederajat	1	sudah	V			6	105
SMP/sederajat	1	sudah	<u></u>				1 4
SMA/sederajat			ļ				
PTN					-		
PTS			<u> </u>				
SLB			ļ		-		
					_		
							
	l						

2. Pendidikan Formal Keagamaan

Nama	Jumlah	Status (Terdaftar,	(Terdaftar.			Jumlah Tenaga	Jumlah siswa/
• , = . = . =		terakreditasi)	Pemerintah	Swasta	Dll	Pengajar	Mahasiswa
Sekolah Islam							
Raudhatul							
Athfal			·				
btidayah	1	Beium		V		4	65
Tsanawiyah					i		
Alivah							
Ponpes							
Perguruan							
Tinggi				•			
					<u> </u>		
			•				
Sekolah							
Katholik					1		
Seminari	,						
Menengah							
Seminari							
tinggi							
Biara							
TK/SD							ļ
SMP							
SMA							
Perguruan			1				
Tinggi							
Kursus				L			<u> </u>
Sekolah					İ		
Budha							
							-
				<u> </u>			
			· · ·				
Sekolah					1		1
Protestan				-			
TK/SD							1.
SMP							
SMA							
Perguruan					1.		
Tinggi				_	_		
Kursus							
Sekolah				1		1	
Hindu				 			
0.1-1-1		-+					
Sekolah							
Konghucu	_						
							

3 Pendidikan Non Formal/Kursus

Nama	Jumlah	Status (Terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan (pemerintah, yayasan,dll)	Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah siswa/ Mahasiswa
Komputer					
Seni Musik					
Montir]			-	
Menjahit					
Drafter					
Bahasa					
Mesin		· · ·			
Satpam					
Beladiri					·
Mengemudi					
Kecantikan					T
	1				•

F. LEMBAGA ADAT

1. Keberadaan Lembaga Adat	
Pemangku Adat	Ada/Tidak
Kepéngurusan Adat	Ada/Tidak
2. Simbol Adat	
Rumah Adat	Ada/Tidak
Barang Pusaka	Ada/Tidak
Naskah-naskah	Ada/Tidak
3. Jenis Kegiatan Adat	
Musyawarah adat	Ada/Tidak
Sanksi Adat	Ada/Tidak
Upacara Adat Perkawinan	Ada/Tidak
Upacara Adat Kematian	Ada/Tidak
Upacara Adat Kelahiran	Ada/Tidak
Upacara Adat dalam bercocok tanam	Ada/Tidak
Upacara Adat bidang perikanan/laut	Ada/Tidak
Upacara Adat bidang kehutanan	Ada/Tidak
Upacara Adat dalam Pengelolaan sumber daya alam	Ada/Tidak
Upacara adat dalam Pembangunan rumah	Ada/Tidak
Upacara adat dalam penyelesaian masalah/konflik	Ada/tidak

G. LEMBAGA KEAMANAN

1 W. Jan Timmer	
1. Hansip dan Linmas	Ada/tidak
Keberadaan Hansip dan Linmas	
Jumlah anggota Hansip	orang
Jumlah anggota Satgas Linmas	orang
Pelaksanaan SISKAMLING	Ada/tidak
Jumlah Pos Kamling	buah
2. Satpam Swakarsa	
Keberadaan SATPAM SWAKARSA	Ada/Tidak
Jumlah anggota	orang
Nama organisasi induk/pemilik	
Keberadaan organisasi keamanan lainnya	Ada/tidak
3. Kerjasama Desa/Kelurahan dengan TNI -	POLRI dalam Bidang
TRANTIBLINMAS	
Mitra Koramil / TNI	Ada/tidak
Jumlah anggota	Orang
Jumlah kegiatan	jenis kegiatan
/ POLDI	Ada/tidak
Babinkamtibmas / POLRI	
Jumlah anggota	Orang
Jumlah kegiatan	jenis kegiatan